

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PROVINSI BENGKULU**



**TESIS**  
untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Aan Zulyanto  
C4B008001

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
JUNI  
2010**

**TESIS**  
**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL**  
**TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**  
**DI PROVINSI BENGKULU**

disusun Oleh

Aan Zulyanto  
C4B008001

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 23 April 2010  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D

Drs. Edy Yusuf AG, M.Sc, Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. Hadi Sasana, M.Si

Dra.Johanna Maria Kodoatie, M.Ec, Ph.D

Achma Hendra Setiawan, SE., M.Si

Telah dinyatakan lulus Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Tanggal  
Ketua Program Studi

Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 April 2010

Aan Zulyanto

## ABSTRACT

The role of fiscal decentralization in economic growth has become the attention of many countries, including Indonesia. Since 2001, the Indonesian government has effectively run fiscal decentralization policy as a broad strategy to accelerate regional development. This fiscal decentralization policy has also brought major changes in revenue and expenditure growth districts in the province of Bengkulu.

This study aims to see the influence of fiscal decentralization on economic growth in the province of Bengkulu. The analysis focused on indicators of fiscal decentralization of expenditure, which is the ratio of total local government spending to total central government expenditure. And using a set of control variables consisting of the Initial Level Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital. This study uses panel data and analytical tools of Least Square Dummy Variable (LSDV) or also known as the Fixed Effects Model (FEM).

The study shows that there is a hump-shaped form (a hump-shaped relation) in the influence of fiscal decentralization in the province of Bengkulu. This means that when the degree of fiscal decentralization is not too high, then the fiscal decentralization policy will bring positive impact on economic growth, but the degree of decentralization is too high, fiscal decentralization policies will only hinder economic growth. However, the government with a low degree of decentralization such as Kaur and Lebong should increase the degree of fiscal decentralization because of being able to encourage economic growth. While areas with a high degree of decentralization as the Bengkulu and Bengkulu Utara should not improve the degree of fiscal decentralization, because it may hinder economic growth. Government with a high degree of fiscal decentralization should be focus to do more efficiency and effectiveness of government spending because it would provide better benefits for regional economic growth.

*Key Words ; Fiscal Decentralization, Economic Growth, a hump-shaped relation, Bengkulu Province*

## ABSTRAKSI

Peran Desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian banyak Negara, termasuk Indonesia. Sejak 2001, secara efektif pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal yang luas sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan besar dalam perkembangan penerimaan dan belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu.

Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Analisis desentralisasi fiskal difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan *Human Capital*. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM).

Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat bentuk *hump-shaped* (a *hump-shaped relation*) dalam pengaruh desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu. Artinya pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlampaui tinggi, maka kebijakan desentralisasi fiskal akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada derajat desentralisasi fiskal terlampaui tinggi, kebijakan desentralisasi fiskal justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian daerah dengan derajat desentralisasi rendah seperti Kabupaten Kaur dan Lebong perlu meningkatkan derajat desentralisasi fiskal karena peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara daerah dengan derajat desentralisasi tinggi seperti Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara sebaiknya tidak melakukan kebijakan yang berorientasi pada usaha peningkatan derajat desentralisasi fiskal, karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah dengan derajat desentralisasi fiskal tinggi sebaiknya justru lebih berfokus untuk melakukan kebijakan efisiensi dan efektifitas pada anggaran pengeluaran pemerintah karena akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci ; Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, a Hump-Shaped Relation, Provinsi Bengkulu.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, petunjuk, dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU” sebagai salah syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S-2 Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Dalam proses penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, arahan, kritik, dorongan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Melalui lembar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada;

1. Direktur program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar di pascasarjana Universitas Diponegoro.
2. Ketua dan Sekretaris I serta Sekretaris II program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
3. Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama serta Dra. Johanna Maria Kodoatie, M.Ec, Ph.D selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga demi terselesainya tesis ini.
4. Segenap Dosen MIESP Undip yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pemikiran baru selama kegiatan perkuliahan.
5. Keluarga tercinta yang ada di Palembang; Bpk. Pairan dan Ibu Zulaiha (alm) serta Saudara-saudaraku; Yuk Iin dan Kak Pensi, Erik, Jajak, dan Dian. Juga untuk Ayah dan Mak Yam, Kak Dian dan Yuk Betty serta tak ketinggalan buat M.

Azzam Al-Fatah, Ricky, dan Wiwid. Harapan dan Do'a dari keluarga besar ini telah menjadi semangat yang luar biasa bagi penulis selama menjalankan studi.

6. Keluarga Besar yang ada di Bengkulu; Bapak Ramli Musa dan Ibu Helda, Yuk Eva dan Kak Nikson, Halim dan Dini, Mila dan Dian, dan Anshorie. Juga keponakan-keponakanku Sheila, Sari, Luna, dan si kecil Azzam. Terkhusus kepada Istriku tercinta; Barika, SE.,M.Si, terima kasih atas pengertian dan kesabaranmu dalam menjalani dan melewati perjuangan ini.
7. Teman-teman MIESP angkatan IV ; Masri, Yohan, Zulkifli, Afif, Andry, Lala, Ratih, Lira, Wenny, dll serta Penghuni Kost WSR ; Ferry, Anton, Digo, Rio, Tegar, Oki, Aldi, Fajar, Regy, Rahman dan lainnya yang telah menjalin kebersamaan selama ini, sehingga masa studi ini menjadi sangat menyenangkan.
8. Teman-teman di IPP 03 Palembang ; Mbah April, Fahmi, Robby, Yudi, Endang, Denny, Eeng, Kak Ujang, Kak Didi, In, Ferry, Acik, dll yang selalu membangkitkan kenangan-kenangan indah pada kampung tercinta..
9. Keluarga Besar Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan selama studi.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan/keterbatasan yang ada dalam tesis ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

Semarang, Juni 2010  
Penulis

Aan Zulyanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I    PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan .....	13
1.4. Manfaat .....	13
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	14
2.1. Tinjauan Pustaka .....	14
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	15
2.1.2. Desentralisasi Fiskal... ..	22
2.1.2.1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia .....	27
2.1.2.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	31
2.1.3. Penelitian terdahulu .....	43
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	50
2.3. Hipotesis .....	51
BAB III    METODE PENELITIAN	53
3.1. Definisi operasional variabel .....	53
3.2. Jenis dan sumber data .....	54
3.3. Metode pengumpulan data .....	55
3.4. Populasi dan sampel, .....	56
3.5. Teknik analisis .....	56
3.5.1. Pengujian model .....	59
3.5.2. Pengujian asumsi klasik .....	61
3.5.3. Pengujian kriteria statistik .....	65
BAB IV    GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	68
4.1. Letak Geografis .....	68
4.2. Iklim dan Topografi .....	69
4.3. Penduduk dan Tenaga Kerja .....	71

4.3.1.	Jumlah dan Distribusi Penduduk .....	71
4.3.2.	Kepadatan Penduduk .....	72
4.3.3.	Tenaga kerja .....	74
4.4.	Pendidikan dan Kesehatan, .....	75
4.4.1	Pendidikan .....	75
4.4.2.	Kesehatan .....	76
4.5.	Perekonomian Daerah .....	78
4.5.1.	Struktur Perekonomian .....	78
4.5.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	80
4.5.3.	Inflasi .....	81
4.6.	Keuangan daerah .....	82
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	86
5.1.	Hasil Analisis Data .....	86
5.1.1.	Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Bengkulu .....	86
5.1.1.1.	Rasio Pendapatan Dan Belanja Daerah ....	86
5.1.1.2.	Komposisi Penerimaan Daerah .....	88
5.1.1.3.	Alokasi Belanja Daerah .....	90
5.1.2.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu.....	92
5.1.2.1.	Pengujian Model .....	92
5.1.2.1.1.	F Test .....	92
5.1.2.1.2.	Hausman Test .....	93
5.1.2.2.	Pengujian Asumsi Klasik .....	94
5.1.2.2.1.	Autokorelasi .....	94
5.1.2.2.2.	Heterokedastisitas .....	95
5.1.2.2.3.	Multikolinearitas .....	96
5.1.2.2.4.	Normalitas .....	97
5.1.2.3.	Pengujian Kriteria Statistik .....	98
5.1.3.3.1.	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	98
5.1.3.3.2.	Pengujian Secara Simultan (uji F) .....	99
5.1.3.3.3.	Pengujian Secara Parsial (Uji t) .	99
5.2.	Pembahasan .....	102
5.2.1.	Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Bengkulu .....	102
5.2.2.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu.....	106
5.2.2.1.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal.....	107
5.2.2.2.	Pengaruh Variabel-Variabel Kontrol .....	115

5.2.2.2.1. Pengaruh Level Awal Pertumbuhan Ekonomi .....	115
5.2.2.2.2. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk .....	116
5.2.2.2.3. Pengaruh Investasi .....	117
5.2.2.2.4. Pengaruh Human Capital .....	117
 BAB VI PENUTUP	 118
6.1. Kesimpulan .....	118
6.2. Saran .....	120

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
BIODATA

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Perkembangan Daerah Pemekaran di Provinsi Bengkulu	9
Tabel 1.2.	Perkembangan Pendapatan Perkapita Indonesia dan Provinsi Bengkulu Tahun 2003 – 2008	10
Tabel 2.1.	Daftar penelitian terdahulu tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi	41
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2008	71
Tabel 4.2.	Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu Tahun 2003-2008	81
Tabel 4.3.	Laju Inflasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2004-2008	82
Tabel 5.1.	Hasil Pengujian Untuk Menentukan Tehnik Analisis Yang Sesuai Antara Common Effect Model dengan Fixed Effect Model Melalui F Test	93
Tabel 5.2.	Hasil Pengujian Untuk Memilih Tehnik Analisis Yang Sesuai Antara Random Effect Model dengan Fixed Effect Model Melalui Hausman Test	94
Tabel 5.3.	Hasil Pengujian Heterokedastisitas Melalui White Test	96
Tabel 5.4.	Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	100

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001 – 2008	6
Gambar 1.2. Perkembangan Jumlah Pemerintahan Daerah Di Indonesia Tahun 1998 – 2008	8
Gambar 2.1 Output Steady State dan Investasi	19
Gambar 2.2. Komponen Penerimaan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.	29
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	50
Gambar 4.1. Peta Provinsi Bengkulu	68
Gambar 4.2 Kepadatan Penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan Kabupaten/kota Tahun 2008	73
Gambar 4.3 Jumlah Tenaga kerja dan Angkatan kerja di provinsi Bengkulu Tahun 2006-2008	74
Gambar 4.4. Struktur Perekonomian di Provinsi Bengkulu Berdasarkan lapangan Usaha Tahun 2008 (%)	79
Gambar 4.5. Struktur Perekonomian di Provinsi Bengkulu Berdasarkan penggunaan Tahun 2006-2008 (%)	80
Gambar 4.6. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2004-2008 (Rp. Milyar)	83
Gambar 4.7. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2004-2008 (Rp. Milyar)	85
Gambar 5.1. Rasio Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Terhadap Pendapatan dan Belanja Pusat Tahun 2004-2008	87
Gambar 5.2. Komposisi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2004-2008	89
Gambar 5.3. Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2004-2008	90

Gambar 5.4.	Hasil Pengujian Autokorelasi melalui Durbin Watson Test	95
Gambar 5.5.	Hasil Pengujian Normalitas Melalui Jarque – Bera Test	97
Gambar 5.6.	Proporsi Transfer Ke Daerah Terhadap Total Belanja Pemerintah Tahun 2002 - 2008 (%)	110
Gambar 5.7.	Bentuk <i>Hump-Shaped</i> Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu	112

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
Lampiran II	Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (Rp. Milyar)
Lampiran III	Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu (Rp. Milyar)
Lampiran IV	Input Data Untuk Analisis Regresi
Lampiran V	Hasil Regresi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu pada Indikator Pengeluaran
Lampiran VI	Hasil Korelasi Antar Variabel Bebas

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu hasil studi desentralisasi fiskal seringkali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama diantara para peneliti dan peminat desentralisasi. Ada silang pendapat dengan masing-masing pihak memiliki argumentasi logis serta telah membuktikannya secara empiris. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hasil studi dari beberapa ahli seperti Davoodi dan Zou (1998) serta Woller dan Phillips (1998) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Lebih jauh, Zhang dan Zou (1998) serta Xie, et all (1999) mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kurang mengantungkan bagi pembangunan. Sebaliknya, hasil studi Iimi (2005) dan Malik dkk (2006) menunjukkan hasil berbeda, yakni bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Atas fenomena ini, Breuss dan Eller (2004) menyatakan bahwa ada efek ambivalent dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan

ekonomi, sehingga sulit untuk menarik rekomendasi yang tepat tentang bagaimana desentralisasi yang optimal. Lebih lanjut Breuss dan Eller menyimpulkan bahwa tidak ada kejelasan, atau hubungan otomatis desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian Hidayat (2005) berpendapat bahwa persoalan desentralisasi sesungguhnya belum mencapai suatu titik akhir. Perbedaan tersebut bukan berarti bahwa studi tentang desentralisasi sedang mengalami krisis. Ini adalah suatu proses untuk menemukan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan aplikatif. Secara implisit ini berarti tantangan bagi pendukung desentralisasi untuk terus melakukan studi eksplorasi. Menurut Vazquez dan McNab (2001) agenda yang belum terselesaikan dalam teori dan praktek tentang desentralisasi fiskal adalah untuk memahami bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi sasaran-sasaran ekonomi tradisional meliputi efisiensi ekonomi, keadilan fiskal secara horizontal, dan stabilitas ekonomi makro.

Secara prinsipil, munculnya gagasan tentang desentralisasi merupakan suatu antithesis atas struktur politik yang sentralistik. Dengan kata lain, karena struktur politik yang sentralistik cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintah pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, dan/atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hidayat, 2005). Lebih jauh, mengutip pendapat Allen, Kuncoro (2004) menyatakan bahwa timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*),

tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di Negara dunia ketiga. Perhatian terhadap desentralisasi fiskal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya terbatas terhadap negara-negara berkembang, tetapi juga muncul dan menjadi agenda utama banyak negara-negara OECD (Vazquez dan McNab, 2001).

Dalam konteks Negara berkembang, mengutip pendapat Smith, Hidayat (2005) menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar Negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal, yaitu; untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Senada dengan itu Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistis yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini memberikan kewenangan kepada daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Bagian yang menjadi urusan Pemerintah Pusat hanya meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal, serta Agama.

Meskipun begitu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Hal ini sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, hanya desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antardaerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997). Pada masa orde baru, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan pemerintah dengan dibarengi dengan kontrol yang ketat terhadap militer dan birokrasi, sehingga pada akhirnya relasi pusat-daerah periode orde baru lebih cenderung bergerak ke arah kutub sentralisasi dari pada kutub

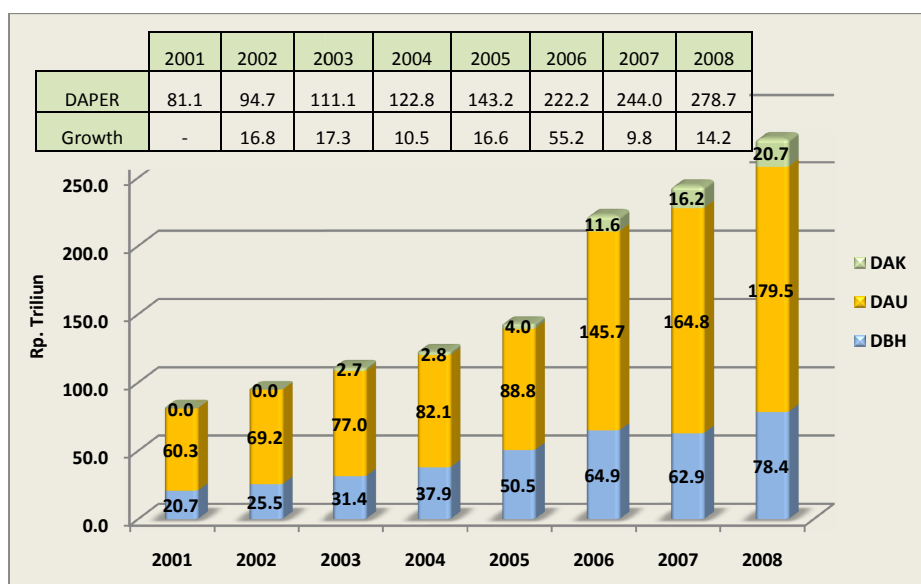
desentralisasi. Menurut Jakti dalam Hidayat (2005) setidaknya ada dua alasan utama mengapa rezim orde baru cenderung melakukan sentralisasi kekuasaan. *Pertama*, secara politis, hal itu berkaitan dengan menciptakan stabilitas politik dan ketahanan nasional yang kuat. *Kedua*, dalam dimensi ekonomi, sentralisasi kekuasaan tersebut berkaitan dengan kehadiran model neo-keynesian yang telah dijadikan landasan konseptual oleh para teknokrat dalam mendesain kebijakan pembangunan ekonomi orde baru.

Era baru Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Proses pelaksanaannya juga diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru, yakni UU no. 32 tahun 2004 mengganti UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU no. 33 tahun 2004 mengganti UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD). Perubahan terutama berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dengan lahirnya kedua UU ini, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal, yakni hubungan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, maupun hubungan secara horisontal antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif baik ditingkat pusat maupun Daerah .

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pada awal desentralisasi fiskal, transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan

(DAPER) hanya sebesar Rp. 81,1 triliun, dan meningkat sebesar 16,8 persen ditahun 2002 menjadi Rp. 94,7 triliun. Tahun 2006 Dana Perimbangan mencapai Rp. 222,2 triliun atau meningkat sebesar 55,2 persen dari tahun sebelumnya. Sampai tahun 2008, besarnya dana perimbangan telah mencapai Rp. 278,7 triliun. Secara jelas, besarnya transfer ke daerah ini dapat dilihat pada gambar berikut;

**Gambar 1. 1**  
**Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001 – 2008**



Sumber ; Depkeu, NK RAPBN 2009 dan NK RAPBN 2010.

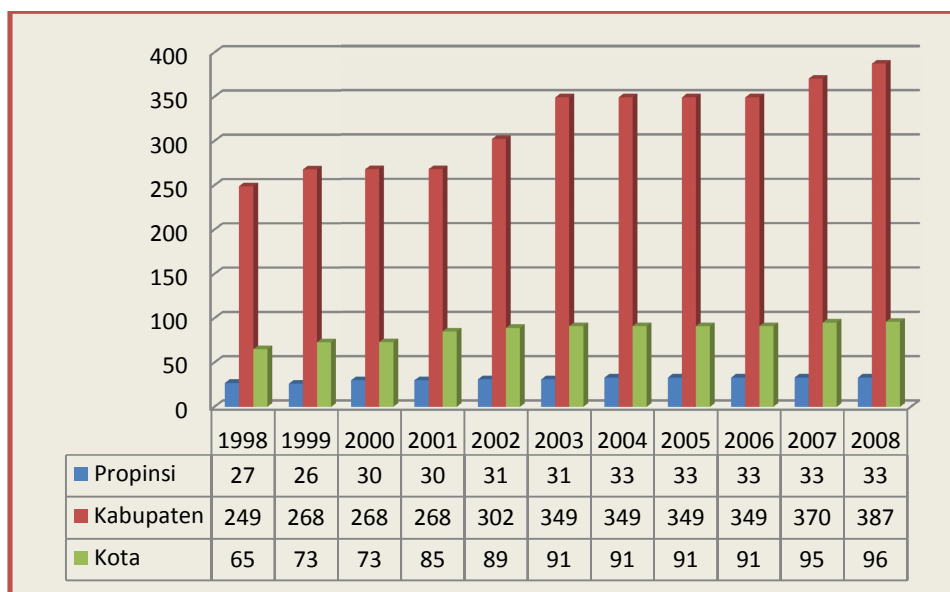
Berdasarkan gambar di atas juga dapat dilihat bahwa sebagian besar dana perimbangan yang ditransferkan kepada pemerintah daerah adalah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya DAU hingga tahun 2008 mencapai Rp. 179,5 triliun rupiah atau sekitar 64,4 persen dari total dana perimbangan pada tahun yang sama. Secara absolut, besarnya DAU ini meningkat jauh dari jumlah DAU pada tahun 2004 yang hanya sebesar Rp. 60,3 triliun, akan tetapi secara proporsi DAU tahun

2008 ini sedikit menurun dibandingkan tahun awal desentralisasi yang mencapai 74,3 persen.

Sementara itu, porsi DBH menunjukkan trend yang semakin baik. Tahun 2008 DBH mencapai Rp. 78,4 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan DBH tahun 2001 yang sebesar Rp. 20,7 triliun. Secara proporsi, DBH ini juga mengalami peningkatan, yakni dari 25,5 persen di tahun 2001 menjadi sebesar 28,1 persen dari total dana perimbangan pada tahun 2008. Begitu juga jika dilihat pada transfer DAK tahun 2008 yang telah mencapai Rp. 20,7 triliun. Jumlah DAK ini jauh lebih besar dibanding DAK tahun 2003 yang hanya sebesar 2,7 triliun, bahkan pada tahun 2001 dan 2002, transfer DAK ini belum dialokasikan ke dalam dana perimbangan untuk pemerintah daerah.

Selain transfer ke daerah yang mengalami pelonjakan drastis, desentralisasi dan otonomi daerah ini juga diwarnai oleh maraknya pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Jika pada tahun 1998 jumlah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 27 propinsi, maka pada tahun 2006 bertambah menjadi 33 propinsi atau meningkat 22,2 persen. Begitu juga daerah kabupaten yang semula hanya berjumlah 274 pada tahun 1999, di tahun 2006 mencapai 348 kabupaten atau meningkat 27 persen. Sedangkan daerah kota yang semula berjumlah 70 menjadi 86 daerah di tahun 2006. Pada Tahun 2008 jumlah kabupaten telah mencapai 387 dan kota 96 daerah, sehingga total daerah kabupaten/kota pada tahun 2008 sebanyak 483 daerah.

**Gambar 1. 2.**  
**Perkembangan Jumlah Pemerintahan Daerah Di Indonesia**  
**Tahun 1998 – 2008**



Sumber ; BPS, Indikator Sosial Ekonomi Indonesia, Maret 2009

Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah tersebut terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi APBN. Penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan/transfer pemerintah pusat, terutama DAU, artinya pemekaran ini tidak mencerminkan timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan dilaksanakannya otonomi daerah.

Mengikuti fenomena yang terjadi secara nasional, pemekaran wilayah di provinsi Bengkulu juga terjadi secara signifikan. Sejak tahun 2003 banyak terjadi perubahan wilayah administratif sebagai akibat adanya pembentukan daerah baru,

antara lain berdasarkan UU No. 3 tahun 2003 terbentuknya Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, serta berdasarkan UU No. 39 Tahun 2003 yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kabupaten termuda yaitu kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk berdasarkan UU No. 24 tahun 2008. Sehingga saat ini Propinsi Bengkulu terdiri atas 9 kabupaten dan 1 kota, dari sebelumnya yang hanya terdiri atas 3 kabupaten dan 1 kota.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut;

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Daerah Pemekaran di Provinsi Bengkulu**

No	Kota/Kabupaten	Dasar Hukum	Tahun	Keterangan
1.	Kota Bengkulu	UU No. 28/1959	1959	Daerah Induk
2.	Bengkulu Selatan	UU No. 28/1959	1959	Daerah Induk
3.	Bengkulu Utara	UU No. 28/1959	1959	Daerah Induk
4.	Rejang Lebong	UU No. 28/1959	1959	Daerah Induk
5.	Muko-Muko	UU No. 3/2003	2003	Pemekaran Bkl Utara
6.	Seluma	UU No. 3/2003	2003	Pemekaran Bkl Selatan
7.	Kaur	UU No. 3/2003	2003	Pemekaran Bkl Selatan
8.	Lebong	UU No. 39/2003	2003	Pemekaran Rj. Lebong
9.	Kepahiang	UU No. 39/2003	2003	Pemekaran Rj. Lebong
10.	Bengkulu Tengah *)	UU No. 24/2008	2008	Pemekaran Bkl Utara

Sumber ; Statistik Indonesia, 2007. \*) Berdasarkan UU No. 24/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu

Meski terjadi efouria terhadap kebijakan desentralisasi, implementasi desentralisasi fiskal diprovinsi Bengkulu hingga saat ini cenderung belum mampu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Jika dilihat dari indikator PDRB per kapita, proporsi pendapatan perkapita provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang relatif kecil, yaitu hanya sekitar 50 % dibandingkan pendapatan perkapita nasional dan cenderung terus mengalami penurunan, yaitu menjadi sebesar 49,7 pada tahun 2007 % dan 49,2 % pada tahun 2008. Bahkan jika dilihat berdasarkan harga berlaku, penurunan menjadi jauh lebih besar, yaitu 45,2 persen

di tahun 2007 dan 40,6 persen di tahun 2008. Sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini;

**Tabel 1. 2.**  
**Perkembangan Pendapatan Perkapita Indonesia dan Provinsi Bengkulu**  
**Tahun 2003 – 2008**

Tahun	PDRB Perkapita Harga Berlaku		Proporsi (%)	PDRB Perkapita Harga Konstan		Proporsi (%)
	Bengkulu	Indonesia		Bengkulu	Indonesia	
2003	4,754,867	9,359,312	50.8	3,668,460	7,330,498	50.0
2004	5,231,840	10,610,061	49.3	3,806,128	7,655,520	49.7
2005	6,541,423	12,675,532	51.6	4,027,285	7,999,375	50.3
2006	7,268,141	15,028,519	48.4	4,215,753	8,313,201	50.7
2007	7,930,113	17,545,443	45.2	4,335,452	8,721,325	49.7
2008	8,798,818	21,678,470	40.6	4,479,185	9,111,134	49.2

Sumber ; BPS, Perkembangan beberapa Indikator Sosial Ekonomi Indonesia, Maret 2009.

Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat provinsi Bengkulu tersebut menjadi salah satu penyebab tidak beranjaknya kategorisasi seluruh kabupaten di provinsi Bengkulu sebagai daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2005 Tanggal 27 Januari 2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini juga artinya bahwa Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya Provinsi di bagian barat Indonesia yang seluruh daerah kabupatennya adalah daerah tertinggal. Tidak jauh berbeda, Bappenas (2007) dalam Laporan Pencapaian Millenium Development Goals (MDG'S) menyatakan bahwa provinsi Bengkulu menduduki peringkat ke 10 daerah termiskin di Indonesia dengan indeks kemiskinan sebesar 3,82, di atas rata-rata nasional sebesar 2,89. Daerah dengan kemiskinan terparah yaitu papua (10,56) dan daerah

yang paling baik adalah DKI Jakarta (0,42). Selain itu, BPS (2007) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Bengkulu pada tahun 2007 sebanyak 370.600 orang atau meningkat 2,7 % dari tahun 2006 yang berjumlah 360.000 orang. Dengan kata lain, era desentralisasi fiskal selama ini ternyata baru sebatas prestasi secara politik, yaitu meningkatnya jumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu, tetapi belum mampu membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan kondisi di atas, di mana euforia desentralisasi fiskal terjadi begitu luas dan di sisi lain kesejahteraan masyarakat lokal cenderung tidak mengalami perubahan ke arah perbaikan; maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam studi ini, paling tidak ada dua hal penting yang melatarbelakangi keinginan untuk menggali lebih jauh tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu. *Pertama*, adanya *research gap* yang terjadi pada berbagai studi terdahulu tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil-hasil studi yang dilakukan di berbagai Negara masih menampilkan kesimpulan berbeda dan menyisakan ruang yang cukup untuk menghadirkan studi-studi lanjutan guna memperkaya pemahaman terhadap konsep desentralisasi fiskal itu sendiri. Pada satu sisi kebijakan desentralisasi diyakini dapat membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

sehingga mendorong banyak Negara, baik Negara berkembang maupun Negara maju untuk menerapkannya secara luas sebagaimana yang disimpulkan Malik, dkk (2006) dan Iimi (2005). Namun sebaliknya, pada kasus lainnya konsep desentralisasi justru berdampak negatif sehingga penerapannya justru kurang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi suatu Negara, sebagaimana hasil studi Xie et all (1999) dan Zhang dan Zou (1998).

*Kedua*, Pelaksanaan desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu ternyata belum mampu membawa perubahan penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi baru sebatas mampu memunculkan pembentukan daerah-daerah baru. Mardiasmo (2007) menyatakan bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini senada dengan hasil studi Wibowo (2008) serta Fadjar dan Sembiring (2007) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Fakta bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal ternyata belum mampu membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dapat kita cermati pada kondisi aktual di provinsi Bengkulu. Pendapatan perkapita masyarakat masih sangat kecil, yakni hanya setengah dari rata-rata pendapatan perkapita nasional bahkan menunjukkan gejala semakin menurun. Selain itu jumlah penduduk miskin di daerah juga semakin bertambah, yaitu dari 360 ribu di tahun 2006 menjadi 370 ribu di tahun 2007, serta indeks kemiskinan daerah

provinsi Bengkulu masih berada di atas rata-rata nasional. Dalam Laporan MDG'S Indonesia Tahun 2007 (Bappenas, 2007) mendudukan provinsi Bengkulu sebagai daerah termiskin ke 10 di Indonesia.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian yang akan diajukan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah implementasi desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu ?
2. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu?

### **1.3. Tujuan**

Sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan permasalahan, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu
2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

### **1.4. Manfaat**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah ;

1. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi semua pihak yang ingin mengkaji pelaksanaan desentralisasi fiskal, serta sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu
2. Dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait dalam melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tentu saja tidak dapat mengabaikan kajian terhadap faktor-faktor lain yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara atau daerah. Vazquez dan McNab (2001) menjelaskan salah satu issue yang perlu diperhatikan untuk studi lanjutan guna memperkuat keyakinan kita terhadap hasil empiris tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah kemungkinan adanya kesalahan dalam spesifikasi model estimasi. Literature tentang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi mungkin merupakan suatu fungsi dari banyak variabel seperti struktur hukum dan kebebasan ekonomi, tingkat tabungan, perilaku investasi, akumulasi modal, human capital, pengembangan teknologi, dan sebagainya. Mengeluarkan beberapa variabel kontrol yang kemungkinan penting dalam pertumbuhan ekonomi tersebut bisa saja memberikan kesimpulan yang salah tentang hubungan signifikan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan di suatu Negara/daerah. Oleh sebab itu, perlu dibahas secara lebih mendalam tentang faktor-faktor tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai variabel kontrol dalam analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Dengan adanya variabel kontrol ini, hasil analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi lebih tegar (*robust*).

### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen : *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. *Kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu Negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003), PDB dapat dipandang dalam dua hal. *Pertama*, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. *Kedua*, adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan Negara-negara di dunia, Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*). Menurutnya bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap Negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam

salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain; masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi (Rustiadi, 2007). Untuk menuju tahap lepas landas di mana perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustained growth*) Rostow mensyaratkan adanya penanaman modal yang produktif dari 5% menjadi 10% dari produksi nasional nettonya, karena dengan adanya kenaikan penanaman modal inilah perekonomian dapat berkembang melebihi perkembangan penduduknya (Suryana, 2000).

Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasikan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi modal,

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu Negara yakni total nilai riil netto atas seluruh barang modal produktif secara fisik dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa yang akan datang.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan

tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

### 3. Kemajuan Tehnologi

Kemajuan tehnologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang terpenting. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan tehnologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Kemajuan tehnologi tersebut dapat beragam sifatnya, yaitu ; *pertama*, tehnologi yang bersifat netral. Kemajuan tehnologi yang netral terjadi apabila tehnologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. *Kedua*, kemajuan tehnologi yang hemat tenaga kerja, dan *ketiga*, kemajuan tehnologi hemat modal. Di Negara-negara Dunia Ketiga yang melimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan tehnologi hemat modal merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Kemajuan tehnologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien., kemajuan tehnologi yang meningkatkan pekerja

Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*). Model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan tehnologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu Negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

Dalam model Solow (Mankiw, 2003) output atau jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala hasil konstan.

$$Y = F(K, L)$$

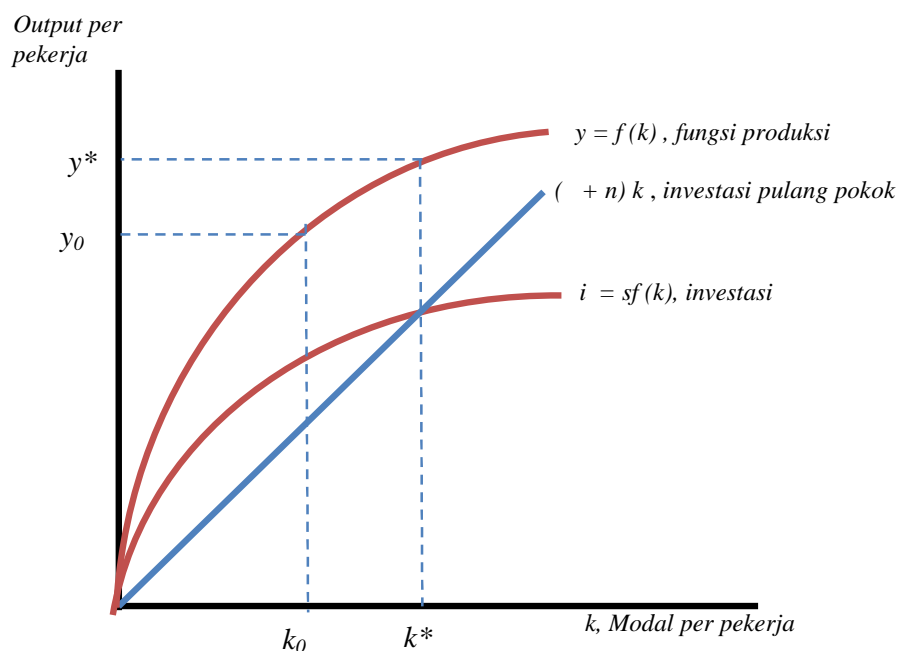
Berdasarkan asumsi skala hasil konstan maka dengan membagi kedua sisi persamaan dengan  $L$  (pekerja) maka dapat juga diidentifikasi bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja, yaitu  $Y/L = F(K/L, 1)$ , dan selanjutnya dapat ditulis persamaan  $y = f(k)$ , yang menggambarkan bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja.

Persediaan modal menjadi determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Dua kekuatan utama yang mempengaruhi persediaan modal adalah investasi dan depresiasi. Dalam jangka panjang persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada kondisi mapan (*Steady state level of capital*), yaitu di mana dalam perekonomian berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi sehingga perubahan persediaan modal ( $k$ ) dan output  $f(k)$  adalah tetap. Notasi yang umumnya digunakan untuk menunjukkan kondisi ini adalah  $k^*$ . Dalam Model Solow dasar ini juga ditunjukkan bagaimana akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya meski dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan output, tetapi pada akhirnya mendekati kondisi mapan dimana modal dan output adalah konstan (Mankiw, 2003)

Menurut Solow pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi merupakan variabel lainnya yang turut mempengaruhi output dan perekonomian suatu Negara. Sebagaimana depresiasi yang mengurangi persediaan modal per pekerja, pertumbuhan pendudukpun akan menyebabkan hal yang sama. Artinya semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Untuk mencapai kondisi mapan, maka dalam perekonomian memerlukan tingkat investasi yang dapat mengoffset pengaruh depresiasi dan pertumbuhan penduduk, atau yang disebut investasi pulang pokok (*break event investment*), yaitu  $k = i - (s + n)k$ , sebagaimana gambar di bawah ini;

**Gambar 2.1**

**Output Steady State dan Investasi**



Sumber : Mankiw, 2003

Satu hal yang penting di sini adalah bahwa meskipun dalam kondisi mapan modal dan output per pekerja adalah konstan, namun dalam perekonomian sesungguhnya output total dan modal total tetap bertambah dari waktu ke waktu. Sedangkan kemajuan teknologi menurut Solow merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu. Kemajuan teknologi ini direfleksikan dengan apa yang disebutnya sebagai efisiensi tenaga kerja, yaitu mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi; ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat (Mankiw, 2003).

Dengan demikian, berdasarkan model Solow ini, secara bersama-sama pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi memiliki kontribusi penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Woller dan Philips (1998) menyatakan bahwa dalam beberapa studi yang mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi perkapita, seperti yang dilakukan Barro (1996), Sachs dan Warner (1997); Sala-i-Martin (1997) Knight, Loayza, dan Villanueva (1993); Mankiw, Romer, dan Weil (1992), serta Levine dan Renelt (1992), terdapat tiga variabels yang selalu terbukti mempunyai hubungan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita, yaitu Level awal pertumbuhan ekonomi (*The Initial Level of GDP*), Rasio Investasi terhadap GDP, dan *Human Capital Accumulation*. Disamping ketiga variabel ini, hasil studi Levine dan Renelt juga menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan penduduk merupakan determinan penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dikemukakan Todaro dan Smith, serta Solow.

Lebih jauh Vazquez dan McNab (2001) menjelaskan bahwa kebanyakan studi yang mempelajari hubungan langsung desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi menerapkan Model pertumbuhan endogenous Barro (*Barro's Endogenous Growth Model*), dimana fungsi produksi terdiri dari berbagai input termasuk modal swasta, dan pengeluaran publik dalam tiga tingkatan pemerintah. Namun dalam beberapa studi yang lain, seperti Davoodi dan Zou (1998) menggunakan variabel kondisi Levine-Renelt (*Levine-Renelt conditioning variables*) atau model pertumbuhan Solow meliputi investasi, pertumbuhan penduduk, dan human capital, untuk menguji kerapuhan (*fragility*) estimasi desentralisasi fiskal.

Berkaitan dengan level awal pertumbuhan ekonomi (*The Initial Level of GDP*), Barry dan Jules (2008) menjelaskan bahwa variabel ini penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi karena digunakan untuk melihat tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konvergensi ini mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan *initial per capita regional GDP*. Artinya semakin tinggi level awal pertumbuhan ekonomi (*initial per capita regional GDP*) maka akan semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam tahun berikutnya (Renelt 1992). Sementara itu, porsi investasi dalam Regional GDP diharapkan akan positif karena secara empiris telah ditemukan bahwa investasi dapat mempengaruhi tingkat produksi di beberapa daerah (Sturm 1998).

Berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, Levine dan Renelt (1992) mengutarakan bahwa population growth menentukan tingkat kemakmuran

ekonomi. Disamping itu, Becker et al. (1990) berpendapat bahwa dengan asumsi tingkat fertilitas sebagai endogenous variable, masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup banyak akan cenderung untuk melakukan investasi lebih di bidang SDM. Di sisi lain, daerah yang jarang penduduknya memiliki insentif ekonomi untuk meningkatkan jumlah anak guna mengisi kekosongan pasar tenaga kerja. Namun demikian, net impact terhadap pencapaian kinerja ekonomi tidaklah mudah untuk ditentukan. Diungkapkan pula bahwa populasi dapat menurunkan produktivitas karena adanya efek diminishing returns atas penggunaan tanah dan sumber daya lainnya (Becker et al, 1999). Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita tergantung dari pemanfaatan ilmu pengetahuan guna mengeliminasi efek diminishing returns atas penggunaan sumber daya alam (Wibowo, 2008).

Selanjutnya sebagaimana disepakati oleh para praktisi dan akademisi bahwa *human capital* atau kualitas sumber daya manusia terkait secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Wibowo, 2008). Dengan demikian, variabel tersebut diharapkan pula akan menghasilkan angka positif dalam penelitian ini.

### **2.1.2. Desentralisasi Fiskal**

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing

kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup territorial suatu Negara. Sedangkan Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Smith juga merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki territorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu Negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005).

Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Ini artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrument yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Tanzi, 2002). Sebagai suatu alat, desentralisasi dapat digunakan pemerintah untuk mendekati diri dengan rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999):

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan
2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan
3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan.

Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006). Dalam pelaksanaannya, konsep

desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Rahmawati, 2008). Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Berdasarkan prinsip *money follow function* Mahi (2002) menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *lokal public goods* meningkat. Sedangkan dalam pendekatan *revenue assignment* dijelaskan peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan.

Dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu (Khusaini, 2006);

### 1. Desentralisasi Pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN) [Zhang dan Zou, 1998]. Selain itu Phillip dan Woller (1997) menggunakan rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pertahanan dan tunjangan social). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

### 2. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini juga diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

### 3. Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah (Phillips dan Woller, 1997). Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.

### 2.1.2.1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Prinsip Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman Negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Ter-minassian (1997) bahwa banyak Negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut Ter-minassian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009) ;

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.

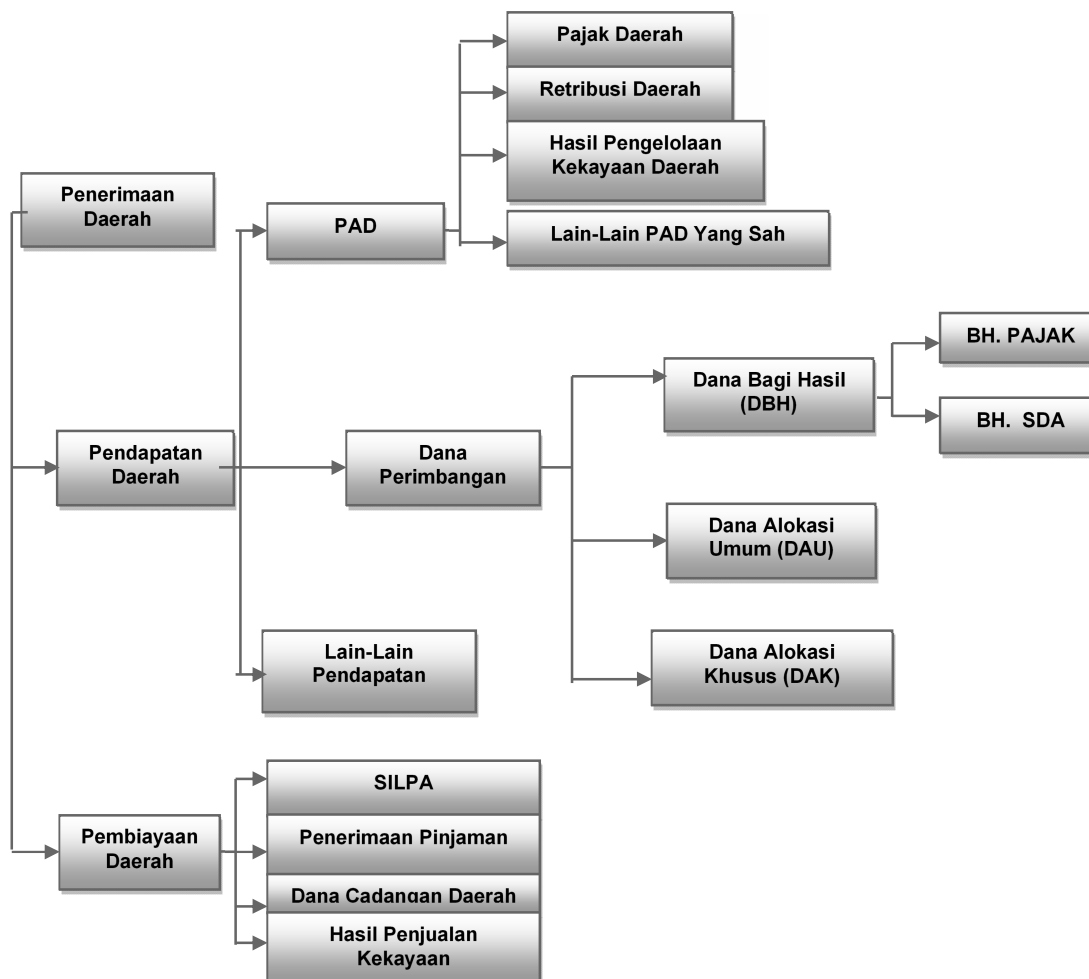
#### 5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Tidak jauh berbeda, (Siddik, 2009) menjelaskan bahwa tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk; (1) membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah; (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional; (3) meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4) mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan (5) memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di banyak Negara yang menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal dan memberikan jaminan kepada rakyat bahwa pelayanan publik akan semakin membaik dan rakyat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan (Bahl and Linn, 1998).

Secara garis besar penerimaan daerah dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

**Gambar 2.2**  
**Komponen Penerimaan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.**



Sumber : UU Nomor 33 Tahun 2004

Mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil

(DBH) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal jenis transfer ke daerah dalam bentuk ini tercatat sebagai komponen terbesar dari dana transfer ke daerah (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut mardiasmo menjelaskan bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu pada anggaran belanja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi (jenis belanja). Pengklasifikasian belanja tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penganggaran dan pelaporan. Oleh karena itu, klasifikasi yang dapat memenuhi fungsi anggaran dan pelaporan harus diformulasikan sebagai berikut:

- klasifikasi menurut fungsi, digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan;
- klasifikasi organisasi, untuk keperluan akuntabilitas;
- klasifikasi menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan obyek (jenis belanja), ketaatan (compliance), pengendalian (control), dan analisis ekonomi.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) dikelompokkan lagi menjadi (i) Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, (ii) Belanja Modal, yaitu belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan (iii) Belanja Lain-lain/Tak Terduga.

### **2.1.2.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995), dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al (1998) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena :

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
- b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Bahn dan Linn (1992) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pernyataan ini didukung oleh dua argument sebagai berikut. Pertama, *median vote theory* yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferensi masyarakat daerah. pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan permintaan masyarakat setempat. Kedua, *fiscal mobility theory* yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antar daerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan

mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Selanjutnya Bahl dan Linn (1992) menyatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena daerah lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing, maka pengeluaran infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat.

Oates menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan (Wibowo, 2008).

Argumentasi lain yang mendasari desentralisasi fiskal adalah munculnya kompetisi atau persaingan antar daerah akan meningkatkan kesamaan pandangan

antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahannya (Davoodi dan Zou, 1998). Sejalan dengan itu, mengutip oates, Wibowo (2008) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi

Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga dikembangkan oleh Prud'Homme (1995) yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah di masa datang. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastuktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Prud'Homme (2003) menyatakan empat area yang menjadi dampak utama dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu;

1. Efisiensi ekonomi

Umumnya desentralisasi selalu dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Baik efisiensi alokasi, yaitu Pembangunan yang berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal akan menjamin efisiensi ekonomi.

2. Kestabilan ekonomi makro

3. Keadilan interpersonal dan interregional, dan

4. Efisiensi politik

Empat aspek di atas sangat terkait dengan fungsi/peranan Pemerintah dalam perekonomian modern sebagaimana dinyatakan Mangkoesoebroto (1999),

yaitu; (i) Peranan Alokasi atau efisiensi, yaitu peranan pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien, (ii) Peranan Distribusi, yaitu peranan pemerintah untuk mendistribusikan sumberdaya dan manfaat pembangunan agar tercipta keadilan dalam masyarakat, dan (iii) Peranan Stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga menjamin ketenangan berusaha bagi setiap warga masyarakat.

Lebih jauh, Thiessen (2003) secara komprehensif mengidentifikasi empat hal yang menjadi argumentasi dasar mengenai manfaat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai argumentasi tersebut dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*, berlakunya Hipotesis Diversifikasi atau *diversification hypothesis*. Argumen ini menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik secara seragam untuk setiap daerah adalah tidak efisien (Oates, 1977). Hal ini karena tingkat keuntungan marjinal dari pelayanan publik berbeda serta adanya ketidaksamaan waktu (periode) atas permintaan terhadap barang dan jasa publik lokal di masing-masing daerah, Dengan desentralisasi, sumber daya dapat disimpan dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan pada masing-masing daerah dan digunakan pada waktu yang tepat sehingga mendorong terjadinya efisiensi. Selain itu pengeluaran di bidang infrastruktur dan sosial yang merespon perbedaan lokal dan regional sepertinya lebih efektif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat yang kemungkinan mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Effect langsungnya terindikasi pada keunggulan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membuat kebijakan

pengeluaran publik yang lebih efisien, sehingga pembayar pajak akan memperoleh kepuasan yang lebih baik. Dengan demikian untuk jumlah pengeluaran yang sama, pemerintah daerah akan menghasilkan kepuasan atau kesejahteraan individu yang lebih baik dibandingkan dengan pengeluaran tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat.. Kondisi ini dikenal sebagai efisiensi konsumen atau *consumer/allocative efficiency* (Vazquez dan McNab, 2001).

Selanjutnya, adanya diversifikasi berpotensi memberikan keuntungan kesejahteraan relatif lebih besar karena berlakunya elastisitas harga negatif terhadap permintaan barang publik, dan studi empiris menemukan bahwa permintaan ini harga sangat inelastis. Oleh karena itu, 'Pareto' efisiensi dapat ditingkatkan melalui desentralisasi fiskal. Menurut model ini, semakin beragam tuntutan masyarakat atas penyediaan barang publik, maka semakin besar manfaat desentralisasi. Untuk itu belanja pemerintah daerah perlu dibedakan menurut selera dan keadaan setempat. Selain itu, adanya mobilitas penduduk menciptakan insentif bagi individu untuk pindah ke komunitas yang dianggap menyediakan kombinasi terbaik antara pelayanan publik lokal dengan tingkat pajak. Perilaku ini akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.

*Kedua*, argumen yang mendorong desentralisasi fiskal adalah Hipotesis Pengekangan Leviathan atau *Leviathan restraint hypothesis*: Brennan dan Buchanan (1980) berpendapat bahwa pemerintah cenderung berorientasi untuk mengupayakan tingkat pendapatan yang tinggi hingga berpotensi merugikan para pembayar pajak. Adanya persaingan secara horizontal dan vertikal di antara

tingkat pemerintahan yang berbeda dapat mencegah timbulnya perilaku maksimisasi pendapatan tersebut. Pemerintah akan berkonsentrasi pada persaingan selain maksimisasi pendapatan seperti mempertahankan atau bahkan menurunkan tarif pajak, menyediakan berbagai kemudahan/bantuan bagi kegiatan bisnis, serta melakukan efisien dalam memproduksi barang dan jasa publik, seraya tetap mempertahankan tingkat pendapatan tertentu. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal membatasi jumlah anggaran mereka dan dengan demikian membatasi pengeluaran atas keseluruhan sektor publik. Kondisi ini mungkin mencegah kelebihan pasokan barang dan jasa publik dan atau timbulnya inefisiensi di sektor publik. Jadi, desentralisasi fiskal memiliki dampak positif pada pertumbuhan per kapita karena penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

*Ketiga*, argumen mendukung pandangan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Hipotesis Peningkatan Produktivitas (*productivity enhancement hypothesis*). Desentralisasi fiskal menyiratkan pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini dapat memberikan insentif bagi mereka untuk tidak hanya mempertimbangkan preferensi penduduk lokal tetapi untuk secara aktif mencari inovasi dalam memproduksi dan menyediakan barang dan jasa publik. Selain itu persaingan antar daerah juga memacu pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dengan biaya yang minimum, dan mendorong terjadi efisiensi produksi. Artinya penyediaan jasa atau infrastruktur dalam jumlah yang sama dapat dilakukan pada biaya yang lebih murah, atau anggaran tertentu akan menghasilkan penyediaan layanan atau infrastruktur dalam jumlah yang lebih banyak ataupun kualitas yang

lebih baik. Dengan demikian desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi produksi atau *producer efficiency* yang lebih besar (Vazquez dan McNab, 2001). Selain itu, desentralisasi fiskal meringankan pemerintah pusat dari urusan yang terlalu banyak, sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi produksi terhadap barang dan jasa publik yang masih menjadi tanggung jawabnya, yaitu barang dan jasa yang mencakup kepentingan masyarakat sangat luas dan / atau secara substansial memiliki skala ekonomi dalam produksinya.

*Keempat*, terdapat beberapa argumen politik, seperti desentralisasi akan mengurangi konsentrasi kekuasaan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan (*vested interest*) atas kebijakan publik, mendorong demokrasi, pembangunan, dan jangka panjang memacu pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian, Thiessen (2003) juga memberikan berbagai pandangan yang memperingatkan kelemahan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai berikut;

1. Desentralisasi fiskal dapat memperkuat kesenjangan regional (*disparitas*) dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan atas tingkat pendapatan dan basis pajak antara wilayah dan daerah. selanjutnya akan mendorong perbedaan dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan dan pelayanan publik lainnya serta mencegah penggunaan faktor-faktor produksi secara penuh termasuk modal manusia. Daerah kaya umumnya akan menyediakan layanan publik yang lebih baik, selain itu terdapat kecenderungan masyarakat daerah kaya untuk menghalau

masuknya masyarakat yang berpendapatan rendah. Adanya perbedaan dan ketidakadilan dalam penyediaan barang publik yang mencakup kepentingan masyarakat secara luas dan lintas daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi per kapita.

2. Desentralisasi fiskal dapat menghasilkan keputusan-keputusan pemerintah dengan kualitas rendah, lebih banyak korupsi, dan meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok yang berkepentingan (*vested interest*). Beberapa ahli berpendapat bahwa pemerintah pusat secara umum dapat mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi: Mereka dapat menarik lebih banyak orang yang memenuhi syarat karena peluang karier dan gaji yang lebih baik (Prud'homme, 1994). Selain itu, ada kasus-kasus di mana demokrasi lokal mungkin menawarkan kontrol yang kurang efektif oleh pejabat terpilih, karena pejabat di tingkat lokal lebih dekat kepada orang-orang dan karena itu mungkin lebih rentan terhadap pengaruh pribadi dan korupsi. Jika kualitas pemerintah menurun, maka desentralisasi dapat meningkatkan inefisiensi.
3. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada negara-negara kecil dan berpendapatan rendah cenderung akan merugikan. Untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dibutuhkan biaya tetap (*fixed cost*) yang tidak sedikit sehingga dapat menghabiskan sebagian besar kapasitas anggaran yang sangat terbatas (Prud'homme 1995). Selain itu, Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa terdapat ambang batas tingkat pembangunan ekonomi yang diperlukan agar desentralisasi fiskal dapat memberikan hasil memuaskan. Ambang batas ini bukan hanya karena adanya biaya tetap desentralisasi fiskal, tetapi juga karena

pada tingkat pendapatan per kapita relatif rendah, kebutuhan untuk penyediaan barang dan jasa publik terfokus pada sedikit barang, sehingga mungkin secara umum tuntutan masyarakat relatif homogen. Perbedaan dalam preferensi individu untuk barang dan jasa publik juga mungkin relatif kecil sehingga pemerintah pusat memiliki semua informasi yang diperlukan untuk menciptakan efisiensi konsumsi dan produksi.

4. Desentralisasi fiskal dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan membuat kebijakan stabilisasi lebih sulit dilakukan berkaitan dengan penyesuaian fiskal untuk mengurangi ketimpangan struktural. Desentralisasi fiskal bahkan mungkin mendorong dan memperburuk ketimpangan struktural tersebut (Tanzi, 1995): Salah satu contoh ekstrem adalah ketika pemerintah daerah tertentu memberikan pembebasan pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintahan daerah yang lain. Tindakan ini dapat memicu ketidakstabilan antar daerah. Di samping itu, koordinasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda mungkin sulit untuk dilakukan secara efektif dan tepat waktu, sehingga dalam jangka panjang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada berbagai pendapat di atas, berbagai penelitian yang menunjukkan hubungan signifikan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dapat ditemui pada berbagai penelitian, antara lain hasil studi Malik dkk (2006) tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan periode 1971-2005. Indikator desentralisasi yang digunakan; *pertama*, indikator pengeluaran terdiri atas ratio pengeluaran pemda terhadap total

pengeluaran pemerintah (RPEC) dan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah dikurangi belanja pertahanan dan bunga hutang (RPECA). *Kedua*, indikator penerimaan, terdiri atas rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah total (RPRC) dan ratio penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah dikurangi penerimaan dari hibah (RPRCA). Hasilnya menunjukkan indikator penerimaan yang telah disesuaikan (RPRCA) mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Senada dengan itu, Iimi (2005) mendapatkan hasil bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita. Dia menyatakan ketika pembahasan dipokuskan pada informasi terbaru pada situasi ekonomi diakhir tahun 1990-an, desentralisasi fiskal, terutama dari sisi pengeluaran adalah suatu instrument dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, penelitian terbaru dari Fadjar dan Sembiring (2007) serta Wibowo (2008) menemukan bukti yang cukup untuk menjelaskan hubungan positif pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berbeda dengan hasil studi di atas, Woller dan Phillips (1998) meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-negara LDC (*less Developed Country*) selama periode 1974-1991 tidak mendapatkan cukup bukti untuk menyatakan adanya pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara LDC tersebut. Begitu juga Baskaran dan Feld (2009) melakukan studi terhadap 23 negara OECD periode 1975-2001. Hasil studi gagal untuk menemukan fakta bahwa

desentralisasi menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bahkan sebaliknya, penelitian Zhang dan Zou (1998) tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di China periode 1978-1992 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga Xie et al (1999) yang melakukan studi di USA periode 1948-1994 menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah telah mengurangi pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam tingkat signifikansi yang rendah. Hasil tidak berbeda juga diperoleh Jin dan Zou (2005) dalam studi di china dalam dua periode. Secara spesifik, Jin dan Zou mendapatkan bahwa pada periode 1979-1993 pertumbuhan ekonomi secara negatif berhubungan dengan tingkat pengeluaran pemerintah provinsi, sedangkan pada masa 1994-1999 pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan signifikan dengan pengeluaran pemerintah provinsi dan dipengaruhi secara negatif oleh penerimaan pemerintah provinsi. Dengan demikian hasil studi kelompok ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penerapannya dalam perekonomian akan memberikan dampak kurang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi.

Penjelasan yang berbeda muncul dalam penelitian Thiessen (2003). Thiessen melakukan studi hubungan jangka panjang antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara OECD periode 1973-1998. Thiessen (2003) berpendapat bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi tidak berhubungan linear, dan Thiessen menggunakan bentuk fungsi kuadrat, yaitu  $y = A + A^2$ . Hubungan akan berbentuk *hump-shaped* jika koefisien positif dan negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *hump-shaped* terbukti terjadi pada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya pada saat derajat desentralisasi masih rendah, maka terdapat hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tingkat desentralisasi yang terlalu tinggi, maka hubungannya menjadi negatif.

Mendukung kesimpulan Thiessen, Akai, dkk (2007) yang meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 50 negara bagian USA periode 1992-1997 mendapatkan bahwa hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat *hump-shaped*. Pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlalu tinggi, maka peningkatan desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik itu pada indikator penerimaan maupun indikator pengeluaran. Namun ketika desentralisasi fiskal sudah optimal, peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.

Terlepas dari berbagai silang pendapat yang ada, argumentasi bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cenderung lebih diterima secara luas. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya praktek desentralisasi fiskal di berbagai Negara, termasuk di Indonesia sebagaimana pendapat Mardiasmo (2007) bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di

Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya ada keyakinan yang kuat dari peminat desentralisasi untuk terus melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

### **2.1.3. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi memang telah banyak ditemukan, akan tetapi sebagaimana dikemukakan pada bagian awal, kesimpulan yang diperoleh ternyata tidaklah sama, bahkan cenderung bertolak belakang. Banyak ahli yang berpendapat bahwa desentralisasi fiskal ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil studi Malik dkk (2006), Iimi (2005), Fadjar dan Sembirin (2007), serta Wibowo (2008). Sementara di sisi lain, tidak sedikit juga yang berpendapat sebaliknya bahwa desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Xie et all (1999), Zhang dan Zou (1998), Serta Jin dan Zou (2005). Dalam beberapa penelitian lain, seperti Baskaran dan Feld (2009) serta Woller dan Phillips (1998) gagal mendapatkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, Studi ini berkeyakinan bahwa terdapat bentuk hump-shaped dalam hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil studi Akai (2007) dan Thiessen (2003). Artinya desentralisasi fiskal akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika

derajat desentralisasi belum terlampaui tinggi, sementara jika derajat desentralisasi sudah terlampaui tinggi, maka peningkatan desentralisasi fiskal justru akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun perbedaan utama studi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa fokus perhatian akan dilakukan terhadap daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, sementara penelitian lainnya kebanyakan berorientasi pada wilayah Provinsi dalam suatu negara. Pertimbangan utamanya adalah bahwa daerah kabupaten/kota sesungguhnya merupakan ujung tombak pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Daerah kabupaten/kota secara langsung mengetahui preferensi masyarakat lokal dan potensi sumber daya daerah. Hal ini juga dapat disinyalir dari perkembangan jumlah daerah kabupaten/kota yang terus meningkat tajam, dibandingkan dengan perkembangan jumlah provinsi di Indonesia.

Secara lebih lengkap beberapa penelitian terdahulu mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi baik yang dilakukan di Negara-negara berkembang ataupun Negara-negara maju serta dengan berbagai kesimpulan yang berbeda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 1**  
**Daftar penelitian terdahulu tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi**

Study	Set Data	Variabel Dependent	Metode	Ukuran Desentralisasi	Ukuran lain	Variabel Kontrol	Hasil penelitian
Akai dkk (2007)	50 Negara Bagian USA periode 1992-1998	Rata-rata tingkat PDB perkapita	Maximum Likelihood method;  Data Cross section	Rasio pengeluaran pemerintah daerah ( <i>local</i> ) terhadap pengeluaran pemerintah daerah ( <i>local and state</i> )  Rasio penerimaan pemerintah daerah ( <i>local</i> ) terhadap penerimaan pemerintah daerah ( <i>local and state</i> )		Jumlah penduduk, Tingkat Pendidikan, jumlah kursi Demokrat di legislative, GINI, Patents, Keterbukaan	Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat <i>hump-shaped</i> . Pada saat derajat desentralisasi fiskal masih rendah, maka peningkatan desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh positif dan signifikan, baik pada indikator penerimaan maupun indikator pengeluaran. Namun ketika desentralisasi fiskal sudah optimal, peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.
Xie et all (1999)	US 1948-1994	PDB perkapita dan Tingkat Pertumbuhan	<i>Multiple Regression Analysis</i> Data ; Time Series	Rasio belanja pemerintah daerah ( <i>local and state</i> ) terhadap total belanja pemerintah, tidak termasuk hibah	Tingkat rata-rata pajak yang diproksi dari rasio total penerimaan pemerintah terhadap PDB	Angkatan kerja, investasi, harga energy, keterbukaan, inflasi, dan GINI	Belanja pemerintah daerah telah mengurangi pertumbuhan ekonomi meskipun pada tingkat yang lemah. Dengan demikian desentralisasi yang lebih jauh dalam belanja publik akan berbahaya

Woller dan Phillips (1998)	23 Negara-negara LDC periode 1974-1991	Tingkat pertumbuhan PDB perkapita	<i>Fixed effect Model</i>  Data panel	Rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap pemerintah  Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat	Rasio penerimaan daerah dikurangi transfer hibah terhadap total penerimaan pemerintah  Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat tidak termasuk belanja pertahanan dan belanja sosial	The Initial Level of GDP, The Ratio of Investment to GDP, Human Capital Accumulation, dan Pertumbuhan Penduduk	Semua indikator desentralisasi fiskal menunjukkan hubungan tidak signifikan, kecuali hubungan negative lemah pada salah satu indikator, Artinya hasil studi tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan adanya pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Thiessen (2003)	Negara-negara OECD periode 1973-1998	PDB perkapita	<i>Multiple Regression Analysis; Ordinary Least Square(OLS)</i>  Data Cross Section	Indikator pendapatan, yang diukur dari porsi pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah terhadap total pendapatan pajak. Rasio pengeluaran daerah terhadap pengeluaran pemerintah	Rasio pendapatan asli daerah (tanpa transfer) terhadap total pendapatan.	Level awal pertumbuhan PDB (initial level of GDP), Rasio Investasi terhadap PDB, <i>Human Capital</i> , dan pertumbuhan penduduk, technical progress, dan depreisasi	Pola hubungan desentralisasi fiskal seperti sebuah lonceng ( <i>bell shaped</i> ), yaitu pada saat derajat desentralisasi masih rendah terdapat hubungan positif dan signifikan, sedangkan pada tingkat desentralisasi yang terlalu tinggi, maka hubungannya menjadi negatif dan signifikan

Malik dkk (2006)	4 provinsi di Pakistan periode 1971-2005	PDB harga berlaku	<i>Multiple Regression Analysis; Ordinary Least Square (OLS) method.</i>  Data panel	Ratio pengeluaran pmda terhadap total pengeluaran pemerintah  Rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah total	Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah dikurangi belanja pertahanan dan bunga hutang  Rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah dikurangi penerimaan dari hibah	keterbukaan (Openness), Inflasi, Pengeluaran pemerintah total, dan Penerimaan pemerintah total	Hasilnya menunjukkan indikator penerimaan yang telah disesuaikan (tanpa hibah) mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Wibowo (2008)	29 provinsi di Indonesia periode 1999-2004	Tingkat pertumbuhan PDB (%)	Regresi, <i>fixed effect model</i> atau <i>Least Squares Dummy Variables (LSDV)</i>  Data panel	Pendapatan daerah kotor/ <i>gross lokal revenue</i>  Pendapatan daerah netto/net lokal. Pengeluaran tingkat kabupaten/kota atau <i>lokal expenditure</i>  Pengeluaran tingkat provinsi/ <i>provincial spending</i> ).	indikator otonomi, yaitu rasio PAD terhadap total pendapatan minus transfer	initial level of GDP dan <i>Human Capital</i>	pendapatan daerah kotor dan netto mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan indikator otonomi, yaitu Rasio PAD justru berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Fadjar dan Sembiring (2007)	26 provinsi di Indonesia 2000-2007	PDRB provinsi di Indonesia	<i>Method: GLS (Cross Section Weights)</i>  Data panel	Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah variabel dummy yang menunjukkan periodisasi masa sebelum dan setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal		Modal ( <i>Capital</i> ), Tenaga Kerja ( <i>Labor</i> ), dan <i>Human Capital</i>	desentralisasi fiskal dan faktor <i>endowment</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Baskaran dan Feld (2009)	23 negara OECD periode 1975-2001	the growth rate of labor productivity	Pooled OLS dan Random Effect  Data Panel	Rasio penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap total penerimaan pajak pemerintah		Rasio pajak terhadap PDB, Human Capital, Rasio Investasi terhadap PDB, Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Keterbukaan,	Hasil studi gagal untuk menemukan fakta bahwa desentralisasi menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Mereka menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Iimi, Atsushi (2005)	51 negara, terdiri dari 7 low, 10 lower middle, 12 upper middle, 22 high income 1997-2001	Rata-rata PDB riil perkapita 1997-2001	Ordinary Least Square (OLS) dan Instrumental Variabel (IV)  Data Cross section	Rasio pengeluaran penda terhadap pengeluaran pemerintah pusat	Tingkat rata-rata pajak, yaitu total pendapatan pajak dibagi GDP	<i>Political freedom</i> , Tingkat pertumbuhan penduduk, <i>Human capital</i> , Level awal pertumbuhan PDB ( <i>initial level of GDP</i> )	Pada akhir tahun 1990-an, desentralisasi fiskal merupakan suatu instrument dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita.

Jin dan Zou (2005)	30 Chinese provinces 1979-1993 & 1994-1999	Tingkat pertumbuhan PDB riil	One way fixed effects. No time dummies  Data Panel	Rasio pengeluaran atau penerimaan pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran atau penerimaan pemerintah	Rasio penerimaan pajak pemda dan pemerintah pusat terhadap PDB	Investasi, Pertumbuhan angkatan kerja, Keterbukaan, Inflasi	1979-1993; Pertumbuhan ekonomi secara negatif dipengaruhi oleh pengeluaran daerah, tetapi berhubungan positif pada penerimaan. 1994-1999; Pertumbuhan ekonomi tidak berhubungan dengan pengeluaran pemda, tapi berhubungan secara negative terhadap pengeluaran.  Kesimpulan; Argumentasi yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat menyebabkan efisiensi dan akan mendorong pertumbuhan, ternyata tidak terbukti di China
Zhang dan Zhou (1998)	28 provinsi di China Periode 1980-1992	Tingkat pertumbuhan GDP riil	<i>Least Squares Dummy Variables</i>	Rasio pengeluaran pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah pusat	Rasio pengeluaran perkapita pemerintah provinsi terhadap pengeluaran perkapita pemerintah pusat	Labor, Inflasi, Keterbukaan, dan Investasi.	Hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar - 0,05

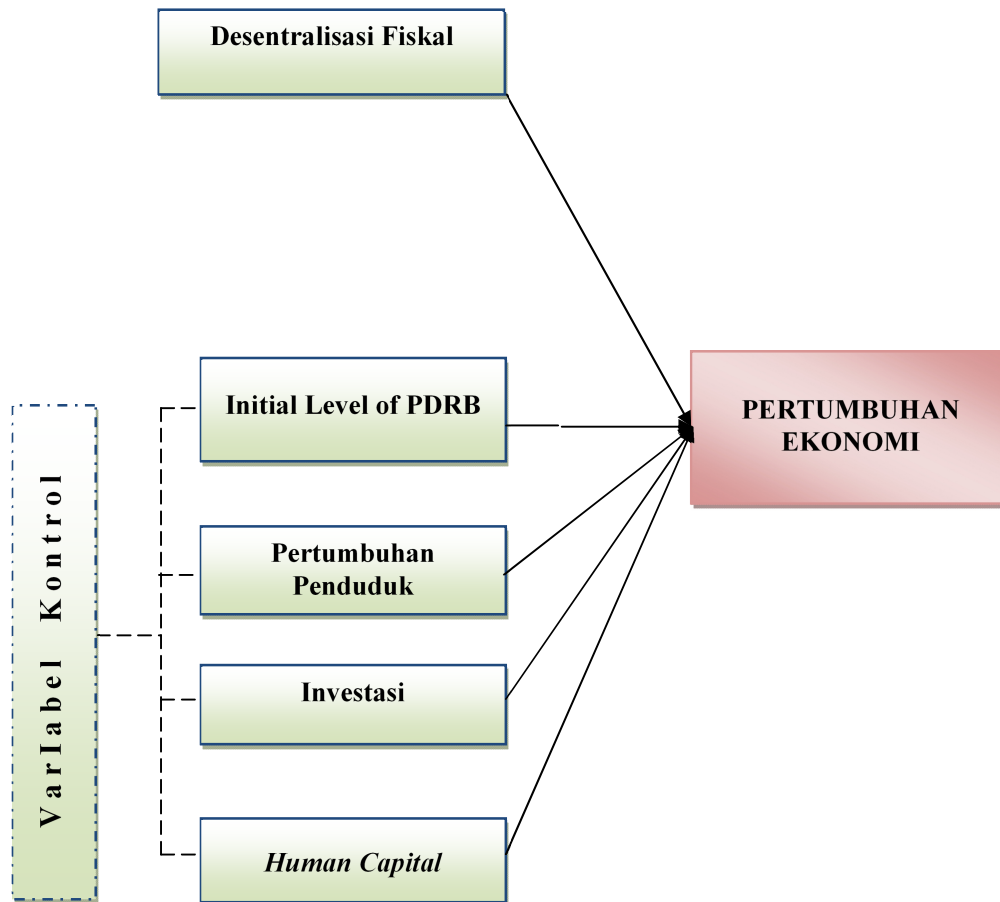
## 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan teori pertumbuhan model Solow dan hasil empiris yang ditemukan dalam studi-studi desentralisasi fiskal sebelumnya, maka studi tentang desentralisasi fiskal ini akan memasukkan empat variabel utama yang akan dijadikan sebagai variabel kontrol, yaitu; Pertumbuhan Penduduk, Investasi, *Human Capital*, dan Tingkat awal pertumbuhan (*Initial level of GDP*). Penggunaan variabel kontrol ini juga telah sesuai dengan *Levine-Renelt conditioning variables* (Vazquez dan McNab, 2001) maupun hasil identifikasi Woller dan Philips (1998) terhadap variabel-variabel yang selalu signifikan muncul dalam studi tentang pertumbuhan ekonomi.

Dalam model pertumbuhan Solow sesungguhnya kemajuan teknologi juga menjadi determinan penting bagi pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Namun dalam studi ini, variabel tersebut tidak dapat dimasukkan karena keterbatasan data yang mengungkapkan secara tegas tentang ukuran kemajuan teknologi di suatu Negara/daerah. Sebagai gantinya, studi ini mengamomodir variabel yang selalu digunakan oleh studi terdahulu yaitu variabel *Human Capital* yang secara implisit variabel ini juga menunjukkan peningkatan kemampuan suatu daerah, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana adanya kemajuan teknologi.

Secara sistematis hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



### 2.3. Hipotesis

Hipotesis penelitian akan diidentifikasi sebagai dasar untuk menganalisa pertanyaan penelitian kedua sebagaimana yang terdapat pada bagian rumusan masalah. Sedangkan untuk pertanyaan penelitian pertama tidak dilakukan pengujian hipotesis, tetapi akan dijelaskan secara deskriptif.

Adapun hipotesis alternatif ( $H_a$ ) secara individu akan dirumuskan sebagai berikut;

- Variabel Desentralisasi Fiskal (DF) serta variabel kontrol; Investasi (INVS) dan Human Capital (HUMANCAP) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu secara signifikan.

$$H_a ; \beta_1, \beta_5, \beta_6 > 0$$

- Variabel kuadrat Desentralisasi Fiskal ( $DF^2$ ) serta variabel kontrol; Level Awal Pertumbuhan (IL\_PDRB) dan Pertumbuhan Penduduk (POP) berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu secara signifikan.

$$H_a ; \beta_2, \beta_3, \beta_4 < 0$$

Sementara itu, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) secara simultan (bersama-sama) akan dirumuskan sebagai berikut;

- Variabel Desentralisasi Fiskal (DF dan  $DF^2$ ) serta variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan (IL\_PDRB), Pertumbuhan Penduduk (POP), Investasi (INVS), dan *Human Capital* (HUMANCAP) secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi Operasional Variabel**

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini menspesifikasikan variabel penelitian sebagai berikut;

- Pertumbuhan Ekonomi direfleksikan dengan pertumbuhan PDRB riil perkapita kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, menggunakan satuan persen (%).
- Desentralisasi Fiskal menggunakan indikator Pengeluaran, yaitu merupakan ratio total belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah pusat. Indikator ini juga digunakan dalam penelitian Malik (2006), Woller dan Phillips (1998), Akai (2007), Zhang dan Zou (1998), dan Wibowo (2008). Untuk melihat hubungan *Hump-shaped*, maka variabel ini juga akan dikuadratkan, sebagaimana studi Akai (2007) dan Thiessen (2003)
- Level Awal Pertumbuhan (IL\_PDRB) merupakan tingkat PDRB riil perkapita yang dimiliki suatu daerah pada periode sebelumnya, menggunakan satuan jutaan rupiah.
- Pertumbuhan Penduduk, terdiri dari perubahan jumlah penduduk tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya, menggunakan satuan persen (%).

- Investasi merupakan rasio investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, menggunakan satuan persen (%).
- *Human Capital*, diukur dari perkembangan jumlah penduduk yang berpendidikan menengah ke atas, menggunakan satuan persen (%). Sebagai proxy atas kualitas sumber daya manusia digunakan rasio penyelesaian pendidikan menengah (SMP) terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas. Rasio ini cukup populer digunakan mengingat usia 15 tahun merupakan usia dimulainya kerja, sehingga cukup tepat menggambarkan kualitas SDM di negara-negara berkembang (Woller dan Phillips 1998).

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua (Riduan, 2004:37). Data yang akan dikumpulkan meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), data Perkembangan Investasi, Jumlah Penduduk serta data-data relevan lainnya. Sumber data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan Nasional provinsi Bengkulu, Bank Indonesia Bengkulu, serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga diperoleh dari akses melalui internet dengan situs antara lain; [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Jenis data adalah data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* (antar daerah) dan data *time series* (runtun waktu). Menurut Gujarati (2004) pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini, pada gilirannya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. *Kedua*, jika efek spesifik signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, penggunaan panel data akan mengurangi masalah omitted variabel secara substansial. *Ketiga*, data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang – ulang (time series), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai study of dynamic adjustment. *Keempat*, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien .

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data-data yang relevan dengan penelitian tersebut (Riduan, 2004).

### 3.4. Populasi

Dalam penelitian ini, daerah yang akan dijadikan objek penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, kecuali Kabupaten Bengkulu Tengah, dikarenakan kabupaten ini baru terbentuk pada pertengahan tahun 2008 dan secara administratif belum efektif sebagai wilayah otonom sendiri. Dengan kata lain, populasi penelitian adalah 8 kabupaten dan 1 kota dalam Provinsi Bengkulu dengan periodisasi waktu dari tahun 2003 sampai 2008.

### 3.5. Teknik Analisis

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dan tehnik analisis kuantitatif. Secara spesifik, tehnik analisis tersebut akan diuraikan sebagai berikut;

1. Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mencapai tujuan pertama yaitu analisis implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Bengkulu. Implementasi ini berkaitan dengan rasio pendapatan dan belanja daerah, komposisi penerimaan daerah, dan alokasi belanja daerah. Secara deskriptif akan dibandingkan implementasi desentralisasi fiskal kabupaten/kota di provinsi Bengkulu dengan hasil yang diperoleh secara rata-rata nasional.

2. Analisis kuantitatif

Tehnik Analisis kuantitatif berupa analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) digunakan untuk mencapai tujuan kedua, yaitu menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan memasukkan beberapa variabel kontrol seperti *Initial level of PDRB*, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan *Human Capital*. Hal ini dimaksudkan agar pengaruh desentralisasi fiskal tersebut dapat juga dilihat secara bersama-sama dengan variabel lain dalam peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

Model desentralisasi fiskal yang digunakan mengadopsi model yang digunakan Akai (2007) dan Thiessen (2003) yang mengasumsikan bahwa hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak linear, tetapi kuadratik, yaitu =  $Growth = a + {}_1DF + {}_2DF^2$ . Dengan demikian spesifikasi model menjadi sebagai berikut;

$$GROWTH = \theta_0 + {}_1DF_{it} + {}_2DF^2 + {}_3IL\_PDRB_{it} + {}_4POP_{it} + {}_5INV_{it} + {}_6HC_{it} + e_{it}$$

Dimana;

Growth	= Pertumbuhan PDRB perkapita
DF	= Desentralisasi Fiskal
IL_PDRB	= Level Awal Pertumbuhan ( <i>Initial Level of PDRB</i> )
POP	= Pertumbuhan Penduduk
INV	= Investasi
HC	= Human Capital
i	= Cross Section
t	= Time Series
e	= Error term

Selanjutnya, berkaitan dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, maka setidaknya ada tiga teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu Gujarati (2007);

1. Metode OLS atau dikenal juga sebagai metode common effect atau koefisien tetap antar waktu dan individu. Dalam pendekatan ini tidak memperlihatkan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu. Ini adalah teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel.
2. Metode fixed effect atau slope konstan tetapi intersep berbeda antara individu, menempatkan bahwa *eit* merupakan kelompok spesifik atau berbeda dalam constant term pada model regresi. Bentuk model tersebut biasanya disebut model least squares dummy variable (LSDV). Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara daerah namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu.
3. Metode random effect menetapkan *eit* sebagai gangguan spesifik kelompok identik dengan *eit*, kecuali terhadap masing-masing kelompok. Namun gambaran tunggal yang memasukan regresi identik untuk setiap periode. Model ini lebih dikenal sebagai model generalized least squares (GLS).

### 3.5.1. Pengujian Model

Untuk memilih model yang tepat, Widarjono (2007) menyarankan beberapa uji yang perlu dilakukan, yaitu. *Pertama* menggunakan Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji F), yaitu untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy atau OLS. Adapun uji F statistiknya, sebagai berikut;

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/(n-k)}$$

Dimana  $RSS_1$  dan  $RSS_2$  merupakan residual sum of squares teknik tanpa variabel dummy dan teknik fixed effect dengan variabel dummy. Hipotesis nulnya adalah bahwa intersep adalah sama. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak n-k untuk denominator. m merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy.

*Kedua*, Uji Lagrange Multiplier (LM) yang bertujuan untuk mengetahui model random effect lebih baik dari model OLS. bertujuan untuk menguji model random effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut;

$$LM = \frac{nT}{2(T-n)} \left| \frac{\sum_{i=1}^n |\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}|^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right|^2$$

$$= \frac{nT}{2(T-n)} \left| \frac{\sum_{i=1}^n (T \hat{e}_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right|^2$$

Dimana  $n$  = jumlah individu;  $T$  = jumlah periode waktu dan  $e$  adalah residual metode OLS. Uji LM didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika LM statistic lebih besar nilai kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nul. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect dari metode OLS. Sebaliknya jika nilai LM statistic lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis maka kita menerima hipotesis nul. Estimasi random effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS.

*Ketiga*, Uji Hausman yang bertujuan untuk memilih apakah menggunakan model fixed effect atau random effect yang paling baik untuk digunakan. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa LSDV di dalam metode fixed effect dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Hasil metode Hausman adalah bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dengan estimator yang tidak efisien adalah nol, selanjutnya mengikuti kriteria Wald, uji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-squares. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak  $k$  dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed Effect

sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Random Effect.

### 3.5.2. Pengujian Asumsi Klasik

Selain beberapa pengujian yang dilakukan pada model empiris, dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa uji asumsi klasik, seperti uji Normalitas, uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi, dan Multikolinearitas. Penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut (Widarjono, 2007; Gujarati, 2004).

#### a. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika asumsi ketiga metode OLS, yaitu asumsi bahwa variasi factor gangguan bersifat konstan tidak terpenuhi. Jika terdapat heteroskedastisitas dalam model, maka penaksiran akan bersifat unbiased, varian dari koefisien-koefisien OLS akan salah, dan penaksir OLS tidak efisien. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan berbagai uji, antara lain ; **Uji Korelasi Rang Spearman, Uji Goldfeld-Quandt, uji Park, Uji Glejser, dan Uji White.** Dalam penelitian ini, asumsi heteroskedastisitas akan di uji dengan White Test. Secara manual white test dilakukan dengan meregres residual kuadrat ( $e_i^2$ ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Setelah itu dapatkan nilai  $R^2$  untuk menghitung  $\chi^2$ , di mana  $\chi^2 = n \cdot R^2$ . Pengujiannya adalah jika  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ , maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak. Dalam aplikasi Eviews 6, uji white test ini merupakan salah satu fasilitas yang telah disediakan untuk menguji heteroskedastisitas. Disamping itu, ada juga satu metode visual yang

dapat dipakai untuk membuktikan kesamaan varians, yaitu melalui gambar/grafik penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai prediksi. Jika penyebarannya tidak membentuk suatu pola tertentu seperti meningkat atau menurun, maka keadaan homoskedasitas terpenuhi.

b. Uji Autokorelasi (otokorelasi)

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi antara anggota-anggota serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Jika terdapat autokorelasi dalam model, maka taksiran yang diperoleh akan bersifat unbias, underestimate dan peramalan tidak akan efisien. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dapat dilakukan dengan **Uji Ratio Non Neumann** dan **Uji Durbin-Watson (DW)**. Dalam studi ini akan digunakan uji Durbin Watson (DW) karena nilai statistik DW biasanya selalu muncul dalam setiap hasil regresi menggunakan Eviews. Adapun kaidah atau ketentuan penerimaan Durbin Watson adalah sebagai berikut (Gujarati;2004);

- $DW < dl$  = terdapat autokorelasi positif
- $dl < DW < du$  = daerah keragu-raguan/tidak dapat disimpulkan
- $du < DW < 4-du$  = Tidak ada autokorelasi
- $4-du < DW < 4-dl$  = daerah keragu-raguan/tidak dapat disimpulkan
- $DW > 4-dl$  = terdapat autokorelasi negatif

### c. Multikolinearitas

Istilah Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear di antara variable-variabel bebas dalam model regresi. Bila variable-variabel bebas berkorelasi sempurna disebut multikolinearitas sempurna (perfect multicollinearity). Beberapa hal penting terkait dengan multikolinearitas adalah (Sumodiningrat, 1999);

- Multikolinearitas pada hakekatnya adalah fenomena sample. Sampel tidak memenuhi asumsi dasar mengenai ketidaktergantungan diantara variable-variabel bebas yang termasuk dalam model.
- Multikolinearitas adalah persoalan derajat (degree) dan bukan persoalan jenis. Multikolinearitas bukanlah persoalan mengenai apakah korelasi di antara variable-variabel bebas itu negatif atau positif; tetapi merupakan persoalan mengenai adanya korelasi di antara variable-variabel bebas.
- Multikolinearitas adalah masalah yang timbul berkaitan dengan adanya hubungan linear di antara variable-variabel bebas. Artinya masalah ini tidak akan terjadi pada hubungan nir-linear di antara variable-variabel bebas.

Jika terdapat multikolinearitas sempurna dalam model, maka penaksir-penaksir OLS tidak bisa ditentukan (indeterminate), Varian dan kovarian dari penaksir menjadi tak terhingga besarnya (infinitely large). Adapun cara untuk mendeteksi Multikolinearitas dapat dilakukan dengan ; *Pertama*, **Uji Frisch's Confluence Analysis** atau **Bunch-Map Analysis**. Gejala yang biasanya dipakai untuk menandai adanya multikolinearitas adalah (a) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), (b) Korelasi Parsial, dan (c) Kesalahan baku dari parameter-parameter regresi.

*Kedua, Uji Farrar-Glauber.* Menggunakan tiga statistik untuk menguji adanya Multikolinearitas, yaitu (a) Chi-Kuadrat atau Chi-Squares, (b) Ratio F, dan (c) Ratio-t. Selain itu uji multikolinearitas dapat juga dilakukan dengan regresi antar variabel penjelas, dengan tujuan untuk mendeteksi apakah model tersebut mengandung multikolinearitas atau tidak. Jika  $R^2$  dari setiap regresi parsial antara variabel penjelas lebih kecil dari pada  $R^2$  regresi keseluruhan, maka dapat disimpulkan model observasi tidak mengandung multikolinearitas (Gujarati, 2004).

#### d. Normalitas

Salah satu asumsi dalam penerapan OLS (*Ordinary Least Square*) dalam regresi adalah distribusi probabilitas dari gangguan  $U_t$  memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan memiliki varians konstan. Salah satu cara mengecek kenormalitasan adalah dengan melihat nilai *Jarque- Bera* atau J-B test, yang diformulasikan sebagai berikut;

$$J - B \text{ hitung} = [S^2/6 + (\frac{K-3}{24})^2]$$

Dimana;

S = Skewness statistik

K = Kurtosis

Jika nilai J – B hitung > J – B tabel, atau bisa dilihat pada nilai probability Obs\* *R Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual  $U_t$  terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya. Selain itu, normalitas dapat juga dilihat dari output histogram ataupun plot probabilitas

normal. Dengan plot ini masing-masing nilai pengamatan dipasangkan dengan nilai harapan pada distribusi normal. Normalitas terpenuhi apabila titik-titik (data) terkumpul disekitar garis lurus. Untuk uji normalitas, studi ini akan melihat nilai Jarque\_Bera dan Output histogram yang dapat dijalankan pada program Eviews 6.

### 3.5.3. Pengujian Kriteria Statistik

Pengujian kriteria statistik melibatkan ukuran kesesuaian model yang digunakan (*goodness of fit*) dan uji signifikansi, baik pengujian secara parsial (uji t) maupun pengujian secara simultan (uji F). Secara spesifik, dapat dijelaskan sebagai berikut;

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi atau  $R^2$  merupakan ukuran *Goodness of Fit* yang menjelaskan apakah garis regresi linear sesuai dengan data observasi. Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang menjelaskan besar variasi regresi akibat perubahan variasi regresi. Jumlah kuadrat variasi total atau *total sum of squares* (*TSS*) terdiri dari jumlah kuadrat variasi dijelaskan atau *explained sum of squares* (*ESS*) dan jumlah kuadrat variasi yang tak dijelaskan atau *residual sum of square* (*RSS*)

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

Dari persamaan di atas, bisa dilihat bahwa batas-batas  $R^2$  adalah Nol dan Satu. Jika taksiaran memiliki ketepatan sempurna, maka jumlah kuadrat yang tidak bisa dijelaskan sama dengan Nol ( $e_i^2 = 0$ ) dan  $R^2 = 1$  menunjukkan

ketepatan yang terbaik (best fit). Jika garis sampel horizontal, ( $\beta = 0$ ), maka  $e_i^2 = y_i^2$ , dan  $R^2 = 0$ .

Jadi ;  $0 \leq R^2 \leq 1$ .

Semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut. semakin mendekati Nol maka variable independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabilitas dari variable dependen (Sumodiningrat, 1999).

b. Uji F atau pengujian secara simultan

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variable-variabel independen secara keseluruhan atau simultan terhadap variable dependen. Pengujian dapat dilakukan

dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Rumus untuk mendapatkan  $F_{hitung}$ , yaitu (Gujarati, 2004):

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (N - 1)}$$

Dimana;

$k$  = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

$N$  = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut;

- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila, yang artinya variabel independent secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependent secara signifikan.

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya variabel independent secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependent secara signifikan.

c. Uji t atau pengujian secara parsial

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi pengaruh variable independen secara individu terhadap variable dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Adapun rumus untuk mendapatkan  $t_{hitung}$  adalah sebagai berikut ;

$$t_{hitung} = \frac{i - i^*}{SE(i)}$$

Dimana;

$i$  = parameter yang diestimasi

$i^*$  = nilai hipotesis dari  $i$  ( $H_0$ ;  $i^* = 0$ )

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut;

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang artinya salah satu variabel bebas (*independent*) tidak mempengaruhi variabel terikat (*dependent*) secara signifikan.
- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya salah satu variabel bebas (*independent*) mempengaruhi variabel terikat (*dependent*) secara signifikan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Letak Geografis

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan pulau Sumatera. Luas wilayah provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi yang terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota. Secara geografis, provinsi Bengkulu terletak di antara  $2^{\circ} 16' - 3^{\circ} 31'$  LS dan  $101^{\circ} 1' - 103^{\circ} 41'$ BT yang membujur sejajar dengan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dengan panjang pantai 525 km. Secara jelas letak provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

**Gambar 4. 1.**  
**Peta Provinsi Bengkulu**



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui batas-batas wilayah provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

#### **4.2. Iklim dan Topografi**

##### **- Iklim**

Berdasarkan data stasiun meteorologi Padang Kemiling dan Stasiun klimatologi Pulau Baai Bengkulu tahun 2008, suhu udara diperkirakan minimum  $21^{\circ}$  dan maksimum  $32^{\circ}$  dengan rata-rata kelembaban mencapai 85%. Iklim wilayah kota Bengkulu adalah iklim tropis, dengan temperatur udara rata-rata  $22^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$ . Lama penyinaran matahari berkisar antara 40 – 80 % dengan kelembaban udara 80 – 87%. Dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya rata-rata kelembaban udara di Propinsi Bengkulu sepanjang tahun ini relatif lebih tinggi, dimana rata-rata kelembaban udara pada tahun sebelumnya sebesar 86 % atau berkisar antara 84-89 %.

##### **- Topografi**

Berdasarkan topografinya provinsi Bengkulu terletak pada tiga jalur yaitu :

1. Jalur pertama

Daerah ini terletak pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut dan diklasifikasikan sebagai daerah Low Land. Luasnya mencapai 708.435 atau sekitar 35,80 persen dari luas wilayah Provinsi Bengkulu.

## 2. Jalur kedua

Daerah ini terletak pada ketinggian 100 – 1000 meter di atas permukaan laut. Posisinya berada di sebelah Timur dari jalur pertama. Daerah tersebut merupakan daerah lereng Pegunungan Bukit Barisan dan terklasifikasi sebagai daerah Bukit Range. Provinsi Bengkulu di bagi dalam dua kelompok yaitu daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan laut yakni sebesar 625.323 ha atau sekitar 31,60 persen dan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan laut luasnya mencapai 405.688 atau sekitar 20,50 persen.

## 3. Jalur ketiga

Daerah ini terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Posisinya berada di sebelah Timur jalur kedua sampai ke puncak Pegunungan Bukit Barisan. Daerah tersebut umumnya merupakan daerah kegiatan vulkanis atau tektonis. Luas daerah pada ketinggian ini mencapai 239.924 ha atau sekitar 12,10 persen.

Dilihat dari sisi topografi dapat dikemukakan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki topografi datar, bergelombang dan berbukit (curam). Dengan rincian masing-masing yaitu topografi datar seluas 708.435 ha (45%), topografi bergelombang seluas 625.323 ha (40%) dan topografi berbukit (curam) seluas 239.924 ha (15%).

### 4.3. Penduduk dan Tenaga Kerja

#### 4.3.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk provinsi Bengkulu pada tahun 2008 mencapai 1.64 juta jiwa. Ditinjau dari jumlahnya perkembangan penduduk Provinsi Bengkulu tergolong cepat. Selama kurun waktu 1980-2008 atau dalam waktu 28 tahun penduduk Provinsi Bengkulu telah berkembang lebih dari 2 (dua) kali lipat, yaitu 0,77 juta pada tahun 1980 menjadi 1,64 juta di tahun 2008.

**Tabel 4. 1.**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2008**

No	Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Bengkulu Selatan	70,406	69,677	140,083	8.5
2	Rejang Lebong	125,803	127,858	253,661	15.4
3	Bengkulu Utara	182,293	161,275	343,568	20.9
4	Kaur	59,761	55,407	115,168	7.0
5	Seluma	84,205	79,654	163,859	10.0
6	Muko-muko	73,622	68,425	142,047	8.7
7	Lebong	46,063	45,079	91,142	5.6
8	Kepahiang	5,893	58,986	117,916	7.2
9	Kota Bengkulu	134,129	140,348	274,477	16.7
	Jumlah	835,212	806,709	1,641,921	100

*Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2009*

Dari data tersebut di atas tampak bahwa penduduk provinsi Bengkulu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Jumlah penduduk laki-laki provinsi Bengkulu pada tahun 2008 sebanyak 835.212 jiwa atau sebesar 50,87 persen sedangkan jumlah penduduk perempuan di provinsi Bengkulu sebanyak 806.709 jiwa atau sebesar 49,13 persen. Ditinjau menurut kabupaten/kota jumlah penduduk tertinggi adalah di kabupaten Bengkulu Utara yakni sebesar 343.568

jiwa atau sekitar 20,92 persen dari total penduduk provinsi Bengkulu. Kabupaten/kota yang memiliki penduduk terendah adalah kabupaten Lebong dengan jumlah penduduk sebanyak 91.142 jiwa atau sekitar 5,6 persen dari total penduduk provinsi Bengkulu.

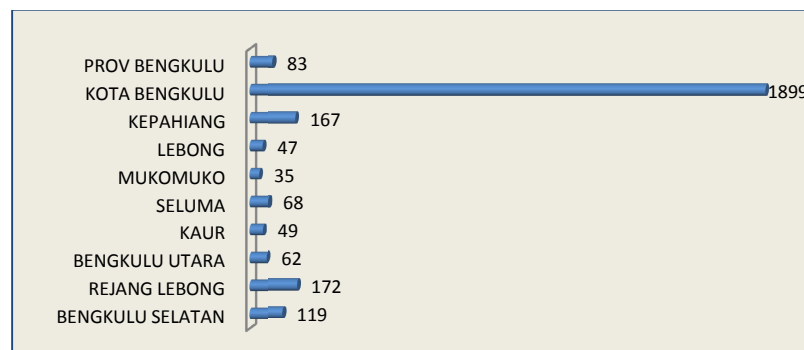
Sementara itu, sampai dengan pada tahun 2008 penduduk provinsi Bengkulu lebih banyak terdapat pada kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu masing-masing sebesar 21 persen dan 17 persen. Kabupaten lainnya yang proporsi penduduknya relatif tinggi yaitu di daerah kabupaten Rejang Lebong yakni mencapai 15 persen. Total proporsi dari ketiga daerah tersebut mencapai 53 persen dari jumlah penduduk di provinsi Bengkulu. Lebih banyaknya jumlah penduduk provinsi Bengkulu di kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu erat kaitannya dengan semakin pentingnya peranan ketiga daerah tersebut dalam kegiatan perekonomian provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara dan Rejang Lebong merupakan daerah pusat pengembangan agrobisnis dan perkebunan besar di provinsi Bengkulu. Sedangkan kota Bengkulu adalah sentra pemerintahan, perdagangan dan pendidikan.

#### **4.3.2. Kepadatan Penduduk**

Dibandingkan dengan luas wilayahnya, penduduk di provinsi Bengkulu tergolong memiliki tingkat kepadatan jarang. Pada tahun 2008 kepadatan penduduk di provinsi Bengkulu sebesar 83 jiwa/km<sup>2</sup> artinya setiap satu kilometer persegi didiami lebih kurang 83 orang penduduk. Dari sembilan kabupaten dan

kota yang terdapat di provinsi Bengkulu daerah yang paling padat penduduknya adalah Kota Bengkulu yakni sebesar 1.899 jiwa/kilometer persegi, hal ini disebabkan luas wilayah yang paling kecil ditempati penduduk yang terbanyak. Kota Bengkulu merupakan wilayah sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya diikuti oleh kabupaten Rejang Lebong yang memiliki kepadatan 172 jiwa/km<sup>2</sup> dan kabupaten Kepahiang sebesar 167 jiwa/km<sup>2</sup>, sebagaimana gambar di bawah ini;

**Gambar 4. 2.**  
**Kepadatan Penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan Kabupaten/kota**  
**Tahun 2008 (km<sup>2</sup>)**



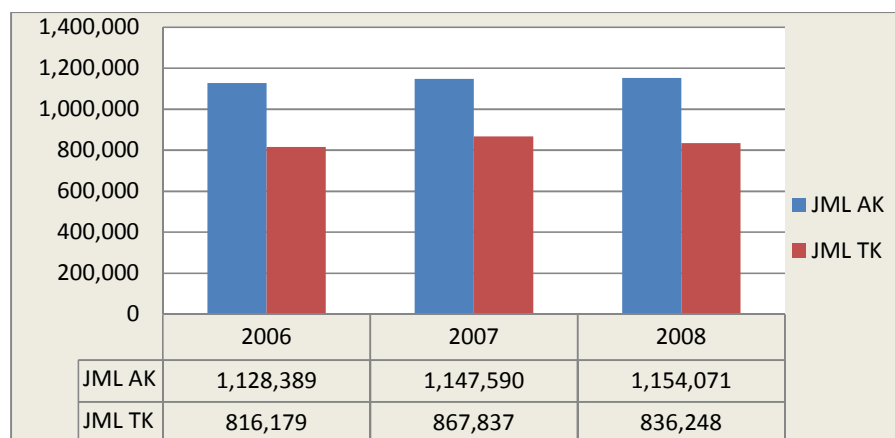
*Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2009*

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa penduduk Bengkulu Utara yang memiliki luas wilayah terbesar, dilihat dari segi kepadatan menempati tingkat kepadatan yang relatif kecil, yaitu hanya sebesar 62 jiwa/km<sup>2</sup> atau di bawah tingkat kepadatan provinsi. Sementara itu, daerah yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah kabupaten Mukomuko yakni sebesar 35 jiwa/km<sup>2</sup> dan kabupaten Lebong sebesar 47 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 4.3.3. Tenaga Kerja

Dari tahun 2006 – 2008 jumlah angkatan kerja di provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Tahun 2007 angkatan kerja naik sebesar 7,56 persen, yaitu dari 1,128,389 orang pada tahun 2006 menjadi 1,147,590 orang di tahun 2007. Tahun 2008 jumlah angkatan kerja kembali meningkat sebesar 0,56 persen atau menjadi 1,154,071 orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja atau penduduk yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak mau bekerja, pada tahun 2008 ini mengalami penurunan sebesar 3,64 persen, yaitu dari sebanyak 867,837 orang di tahun 2007 menjadi 836,248 orang, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut;

**Gambar 4. 3.**  
**Jumlah Tenaga kerja dan Angkatan kerja di provinsi Bengkulu**  
**Tahun 2006-2008**



*Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2009*

Selanjutnya jika dilihat dari kualitas pendidikan pekerja di provinsi Bengkulu maka sebagian besar tingkat pendidikan yang di tamatkan tergolong rendah. Umumnya tingkat pendidikan yang di tempuh adalah SD dan Tidak

Tamat SD atau Tidak Pernah SD. Pada tahun 2008 proporsi pekerja yang tamat SD sebesar 37,89 persen, sedangkan pekerja yang tidak pernah sekolah/belum tamat SD proporsinya mencapai 16,72 persen. Hal itu berarti bahwa hampir 54,61 persen dari total pekerja di provinsi Bengkulu berpendidikan sangat rendah. Sedangkan untuk pekerja yang berpendidikan SLTP sebesar 17 persen, SLTA sebesar 20,06 persen dan Perguruan Tinggi sebesar 5,94 persen.

Tingkat pendidikan pekerja yang rendah tersebut erat kaitannya dengan lapangan pekerjaan yang di laksanakan. Pekerja di provinsi Bengkulu umumnya terserap di sektor pertanian dengan status pekerja sebagai buruh/karyawan di perusahaan perkebunan dan sebagai pekerja keluarga sebesar 65,25 persen. Sedangkan pekerja yang terserap di sektor perdagangan dan jasa-jasa relatif rendah masing-masing sebesar 12,52 persen dan 10,16 persen. Sektor industri masih menyerap tenaga kerja terendah, yaitu sebesar 2,66 persen.

#### **4.4. Pendidikan dan Kesehatan**

##### **4.4.1. Pendidikan**

Fasilitas pendidikan merupakan infrastruktur yang sangat penting, disebabkan dengan fasilitas yang memadai akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia. Keberhasilan program pendidikan terutama program wajib belajar enam tahun dan sembilan tahun secara umum dapat dievaluasi dari perkembangan jumlah murid yang bersekolah di tingkat SD dan SMP. Ditinjau dari perkembangan jumlah muridnya, program wajib belajar SD dan SLTP di Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2005/2006 – 2006/2007 cukup

berhasil. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah murid SD dan SLTP pada kurun waktu 2005/2006 – 2006/2007 masing-masing SD jumlah murid 216.450 orang meningkat 220.626 orang atau 1,93 % dan SLTP jumlah siswa 68.599 orang meningkat 75.307 orang atau 9,78 %. Demikian juga halnya SMU pada Tahun 2004/2005 jumlah murid 33.970 orang meningkat 37.188 orang atau 9,47%.

Jumlah sekolah pada berbagai tingkatan di provinsi Bengkulu juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Jumlah SD meningkat yakni dari 1.308 pada tahun ajaran 2006/2007 menjadi 1.313 pada tahun ajaran 2008/2009. Demikian juga dengan SMP yang meningkat dari 283 SMP menjadi 835 SMP, namun untuk jenjang SMU berkurang 1 sekolah yakni dari 111 SMA menjadi 110 SMA. Di samping itu kelancaran dalam proses belajar mengajar juga dipengaruhi oleh tersedianya jumlah guru dengan rasio yang ideal. Erat kaitannya dengan peningkatan jumlah SD maka jumlah guru SD pada ajaran 2007/2008 – 2008/2009 bertambah dari 10.875 orang guru menjadi 12.694 orang atau meningkat sebanyak 16,73 persen. Demikian juga dengan guru di jenjang pendidikan SMP bertambah dari 4.474 orang menjadi 4.801 orang.

#### **4.4.2. Kesehatan**

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan suatu masyarakat adalah dengan tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas kondisi pelayanan kesehatan itu sendiri. Hingga tahun 2008 jumlah Puskesmas yang dibangun di provinsi Bengkulu telah mencapai 147 unit. Akan tetapi bila

dibandingkan dengan jumlah penduduknya maka jumlah tersebut masih belum cukup memadai. Kondisi ini terlihat dari masih relatif kecilnya rasio puskesmas terhadap penduduk.

Pada tahun 2008 rasio antara Puskesmas dan per 10.000 penduduk di provinsi Bengkulu tercatat sebesar 0,9. Angka tersebut mengungkapkan bahwa setiap 10.000 penduduk di provinsi Bengkulu dilayani kurang dari satu puskesmas. Relatif kecilnya rasio Puskesmas terhadap penduduk ini mencerminkan beban tanggung jawab setiap Puskesmas di provinsi Bengkulu relatif tinggi, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat. Meskipun demikian pemerintah daerah mencoba mengatasi persoalan ini dengan membangun puskesmas-puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling. Sampai tahun 2008 jumlah puskesmas pembantu sebanyak 505 unit dan puskesmas keliling 164 unit. Sementara itu jumlah rumah sakit di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2008 sebanyak 12 unit, Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 7 unit (RSUD M. Yunus Bengkulu, RSUD Manna, RSUD Curup, RSUD Argamakmur, RSUD Kepahiang, RSUD Seluma dan RSJ & KO Soeprpto), 1 Rumah Sakit Bhayangkara, 2 Rumah Sakit DKT dan 2 Rumah Sakit Swasta (RS Raflesia dan Charitas).

Untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta kualitas layanan kesehatan ke seluruh daerah provinsi sampai daerah pedesaan dan daerah kepulauan, Dinas Kesehatan berupaya pula menambah tenaga medis, seperti dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, dan perawat. Sampai tahun 2008 jumlah tenaga medis adalah sebagai berikut; Dokter Spesialis sebanyak 47 orang, Dokter umum 369

orang, Dokter Gigi 52 orang, Apoteker 36 orang, serta Bidan dan Perawat masing-masing 3056 dan 2016 orang.

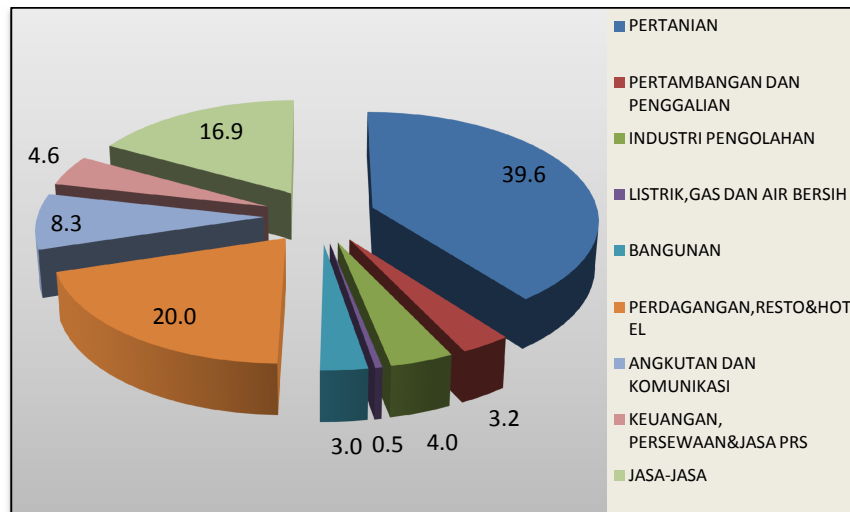
#### **4.5. Perekonomian Daerah**

##### **4.5.1. Struktur Perekonomian**

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian provinsi Bengkulu hingga tahun 2008 masih sangat dominan. Fenomena ini terlihat dari relatif besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB provinsi Bengkulu dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sumbangan sektor Pertanian mencapai 39,6 persen dan menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB provinsi Bengkulu tahun 2008. Kedudukan sektor pertanian sebagai *leading sector* masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya, antara lain disebabkan karena sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, khususnya pada perkebunan sawit dan karet.

Sektor lain yang juga turut memberikan kontribusi besar dalam perekonomian daerah adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 20 persen, sektor Jasa-jasa sebesar 16,9 persen serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 8,3 persen. Sementara itu sektor yang memberikan kontribusi paling rendah adalah Listrik, Gas, dan Air Bersih yang hanya memberikan sumbangan sebesar 0,5 persen, serta sektor Bangunan sebesar 3,0 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

**Gambar 4. 4.**  
**Struktur Perekonomian di Provinsi Bengkulu**  
**Berdasarkan lapangan Usaha Tahun 2008**  
**(dalam persen)**

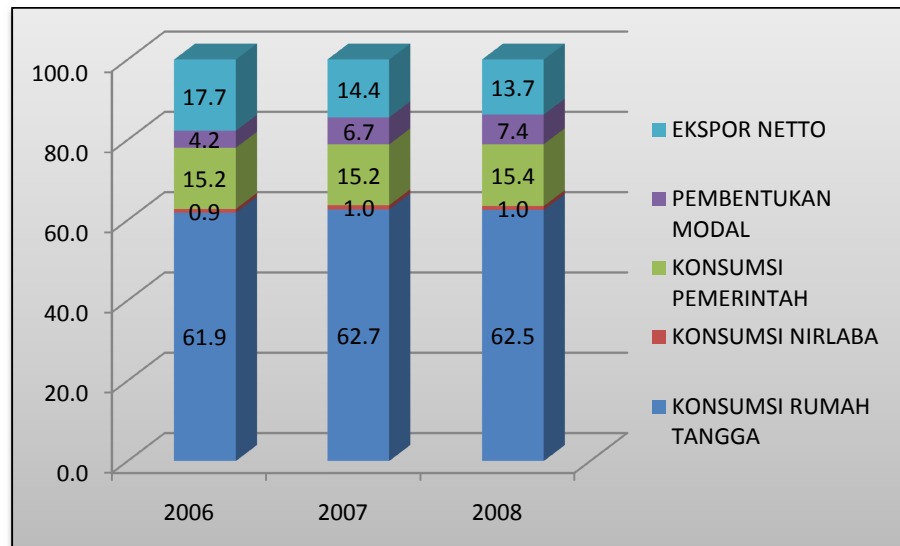


*Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2009*

Selanjutnya bila dilihat dari sisi penggunaan, maka dapat diketahui bahwa sampai tahun 2008 PDRB provinsi Bengkulu sebagian besar pengeluaran masih digunakan untuk konsumsi yakni sebesar 78,6 persen yang terdiri dari 62,5 persen konsumsi rumah tangga, 15,4 persen konsumsi pemerintah dan 1,0 konsumsi nirlaba. Artinya selama tiga tahun terakhir (2006 - 2008) pengeluaran untuk konsumsi masih sangat besar.

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat provinsi Bengkulu masih mengutamakan konsumsinya daripada melakukan investasi atau menabung, terbukti pada pembentukan modal tetap bruto kontribusinya hanya sebesar 7,4 persen sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 6,7 persen. Di samping itu ekspor netto mengalami penurunan sebesar 0,7 persen yaitu dari 14,4 persen pada tahun 2007 menjadi 13,7 pada tahun 2008

**Gambar 4. 5.**  
**Struktur Perekonomian di Provinsi Bengkulu**  
**Berdasarkan penggunaan Tahun 2006-2008**  
**(dalam persen)**



*Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2009*

#### 4.5.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2008 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 14,45 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 mencapai 7,35 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, PDRB provinsi Bengkulu tahun 2008 atas dasar harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 12,69 persen, sedangkan PDRB provinsi Bengkulu tahun 2008 atas dasar harga konstan mengalami perkembangan sebesar 4,93 persen.

Dari tabel 4.2. dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan PDRB provinsi Bengkulu atas dasar harga konstan untuk tahun 2008 sebesar 4,93 persen, menurun bila dibandingkan angka pertumbuhan pada tahun 2007 yakni sebesar

6,0 persen. menurunnya pertumbuhan PDRB provinsi Bengkulu disebabkan oleh menurunnya percepatan pertumbuhan hampir di seluruh sektor ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ini sebagai akibat dari dampak krisis global yang melanda seluruh Negara tak terkecuali provinsi Bengkulu.

**Tabel 4. 2.**  
**Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu**  
**Tahun 2003-2008**

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Triliun)	PDRB Harga Konstan (Triliun)	Pertumbuhan (%)
2003	7.25	5.60	5.4
2004	8.10	5.90	5.4
2005	10.01	6.24	5.8
2006	11.40	6.61	6.0
2007	12.82	7.01	6.0
2008	14.45	7.35	4.9

*Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2009*

#### **4.5.3. Inflasi**

Selama periode 2004-2008 tingkat inflasi di provinsi Bengkulu sangat fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencatat angka sebesar 25.23 persen, dan terus turun pada dua tahun selanjutnya masing masing sebesar 6,52 persen dan 5 persen. Namun pada tahun 2008, inflasi kembali mencapai dua digit, yaitu sebesar 13,44. Inflasi tertinggi di tahun 2008 terdapat pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 19,19 persen dimana pada tahun sebelumnya sebesar 6,47 persen. di urutan kedua adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang meningkat dari 5,84 persen pada tahun 2007 menjadi 17,54 pada tahun 2008. Kelompok perumahan dan kesehatan juga mengalami inflasi dimana

inflasi kelompok perumahan sebesar 14,69 dan untuk kelompok kesehatan sebesar 10,42 atau mengalami peningkatan dari inflasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,9. Sementara untuk kelompok sandang, tahun 2008 sedikit mengalami penurunan, yaitu dari 8,77 persen menjadi 8,44 persen. Secara lengkap perkembangan inflasi di provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 4. 3.**  
**Laju Inflasi di Provinsi Bengkulu**  
**Tahun 2004-2008**

No.	Uraian	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Bahan Makanan	4.06	26.89	11.27	6.46	19.19
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	6.01	15.91	5.3	5.84	17.54
3	Perumahan	3.54	17.6	2.73	6.21	14.69
4	Sandang	5.28	8.83	4.9	8.77	8.44
5	Kesehatan	3.07	5.67	17.42	0.9	10.42
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	5.35	8.54	9.44	0.79	6.58
7	Transport & Komunikasi	6.02	73.33	1.38	0.81	6.26
	<b>Total</b>	<b>4.67</b>	<b>25.23</b>	<b>6.52</b>	<b>5</b>	<b>13.44</b>

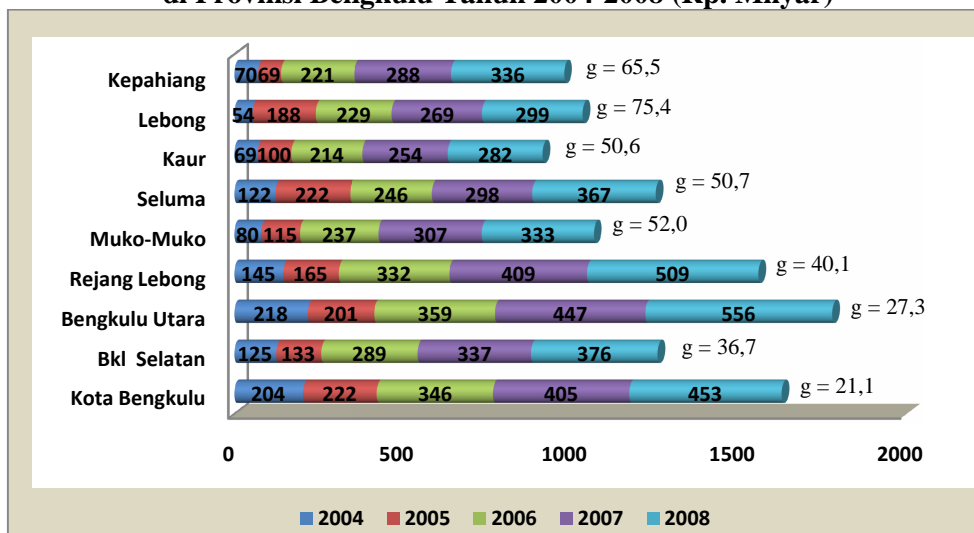
*Sumber ; Bank Indonesia, Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, Juli 2009*

#### **4.6. Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan masing-masing daerah umumnya berbeda satu sama lain. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan kemampuan daerah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada, baik penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari pungutan-pungutan di daerah. Sampai Tahun 2008 kemampuan penerimaan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu juga menunjukkan beragam perbedaan.

Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi kabupaten terbesar dengan jumlah pendapatan daerah mencapai Rp. 556 milyar, diikuti oleh Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 509 milyar dan Kota Bengkulu Rp. 453 milyar. Sementara Kabupaten Kaur tetap menjadi kabupaten dengan pendapatan daerah terkecil dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 282 milyar serta diikuti oleh Kabupaten Lebong sebesar Rp. 299 milyar. Jika diamati perkembangan selama 2004-2008, susunan atau peringkat kapasitas penerimaan daerah ini relatif tidak banyak mengalami perubahan. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah kabupaten/kota dan laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2004-2008 dapat dilihat pada gambar berikut;

**Gambar 4. 6.**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun 2004-2008 (Rp. Milyar)**



Keterangan;

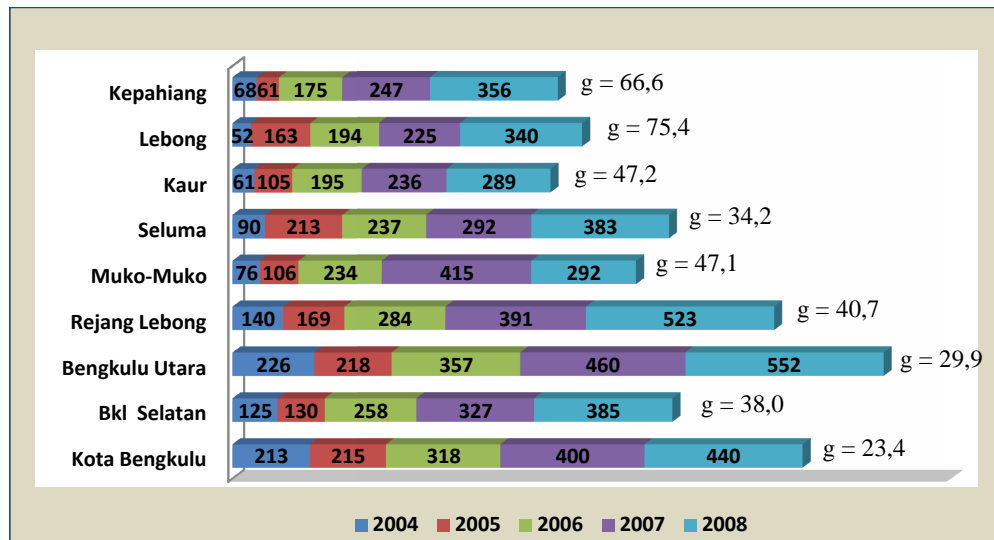
$g$  ; rata-rata laju pertumbuhan pendapatan daerah selama 2004-2008 (%)

Sumber : BPK, Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai tahun, data diolah.

Berdasarkan gambar 4.6. dapat dilihat bahwa pendapatan daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Lebong memiliki laju pertumbuhan rata-rata yang paling tinggi, yaitu mencapai 75,4 persen, diikuti oleh kabupaten Kepahiang sebesar 65,5 persen serta Kabupaten Muko-muko yang mencapai 52,0 persen. Sementara daerah dengan laju pertumbuhan rata-rata terendah adalah Kota Bengkulu sebesar 21,1 persen dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 27,3 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah cenderung akan memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki pendapatan tinggi.

Di samping perbedaan dalam tingkat penerimaan daerah, alokasi belanja daerah yang dilakukan oleh kabupaten/kota di provinsi Bengkulu juga menunjukkan adanya perbedaan. Kabupaten Bengkulu Utara menjadi daerah dengan alokasi belanja terbesar, yaitu mencapai Rp. 552 milyar. Disusul oleh kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 523 milyar dan Kota Bengkulu sebesar Rp. 440 milyar. Sementara Kabupaten Kaur merupakan daerah dengan alokasi belanja terkecil, yaitu hanya sebesar Rp. 289 milyar disusul Kabupaten Muko-muko sebesar Rp. 292 milyar. Meskipun demikian, selama periode 2004-2008 urutan atau peringkat besaran alokasi belanja daerah antar kabupaten/kota relatif tidak menunjukkan perubahan berarti. Secara rinci perkembangan belanja daerah kabupaten/kota dan laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2004-2008 dapat dilihat pada gambar berikut;

**Gambar 4. 7.**  
**Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun 2004-2008 (Rp. Milyar)**



*g* : rata-rata pertumbuhan belanja daerah 2004-2008 (%)

Sumber : Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah, BPK, berbagai Tahun, data diolah

Berdasarkan gambar di atas dapat pula dilihat bahwa Kabupaten Lebong memiliki laju pertumbuhan belanja rata-rata paling tinggi, yaitu mencapai 75,4 persen. Diikuti oleh kabupaten Kepahiang sebesar 66,6 persen dan Kabupaten Kaur sebesar 47,2 persen. sedangkan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah dengan laju pertumbuhan terendah, masing-masing sebesar 23,4 persen dan 38 persen. Selanjutnya jika dibandingkan antara penerimaan dan belanja pada masing-masing daerah pada tahun 2008, tercatat hanya 3 daerah yang mengalami anggaran surplus, yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Muko-muko, sementara 6 kabupaten lainnya mengalami defisit anggaran.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Hasil Analisis Data**

##### **5.1.1. Implementasi Desentralisasi Fiskal di provinsi Bengkulu**

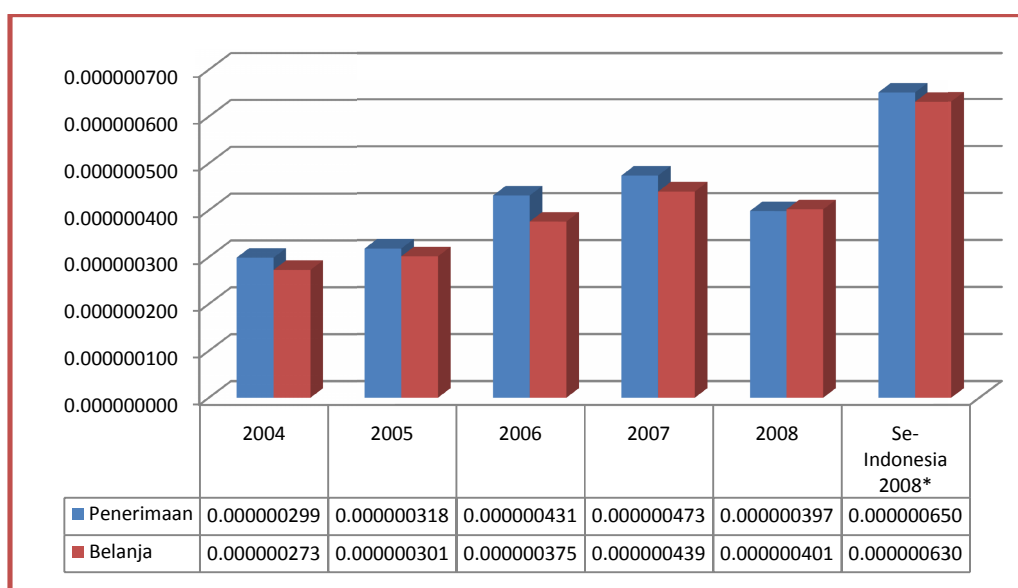
###### **5.1.1.1. Rasio Penerimaan dan Belanja Daerah**

Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan penting dalam kondisi penerimaan dan belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu. Selama periode 2004-2008, penerimaan daerah meningkat sangat tajam, rata-rata mencapai sebesar 44,7 persen. Daerah yang paling tinggi laju penerimaan daerah adalah kabupaten Rejang lebong yang mencapai 75,4 persen, sementara yang terendah adalah Kota Bengkulu dengan pertumbuhan sebesar 23,4 persen. Sementara laju perkembangan belanja daerah selama periode 2004-2008 tercatat sebesar 46,6 persen. Daerah yang paling tinggi laju belanja daerah adalah kabupaten Lebong yang mencapai 75,4 persen dan terendah adalah kota Bengkulu sebesar 21,1 persen.

Meskipun demikian, jika dilihat dari derajat desentralisasi fiskal, yang diukur dari total penerimaan pemerintah daerah terhadap total penerimaan pemerintah pusat maupun dilihat dari sisi rasio belanja daerah terhadap belanja pemerintah pusat, terlihat bahwa perkembangannya masih sangat kecil. Pada tahun 2004 rasio penerimaan hanya sebesar 0,000000299.. Angka ini terus meningkat menjadi 0,000000318 pada tahun 2005, dan 0,000000473 di tahun 2007. Namun pada tahun 2008, rasio penerimaan turun menjadi 0,000000397.

Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio penerimaan daerah kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2008 yang mencapai 0,000000650. Secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Gambar 5. 1.**  
**Rasio Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Terhadap Pendapatan dan Belanja Pusat**  
**Tahun 2004-2008**



Sumber : BPK, Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai tahun, data diolah. \*) DJPK, Depkeu, Ringkasan Realisasi APBD, per 31 Agustus 2009, data diolah.

Berdasarkan gambar di atas juga terlihat bahwa derajat desentralisasi fiskal yang diukur dari rasio total belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah pusat juga tidak jauh berbeda dengan indikator penerimaan. Pada tahun 2004 rasio belanja daerah mencapai 0,000000273. Angka ini terus mengalami peningkatan, yakni menjadi sebesar 0,000000301 di tahun 2005 dan 0,000000439 di tahun 2007. Namun pada tahun 2008, derajat desentralisasi

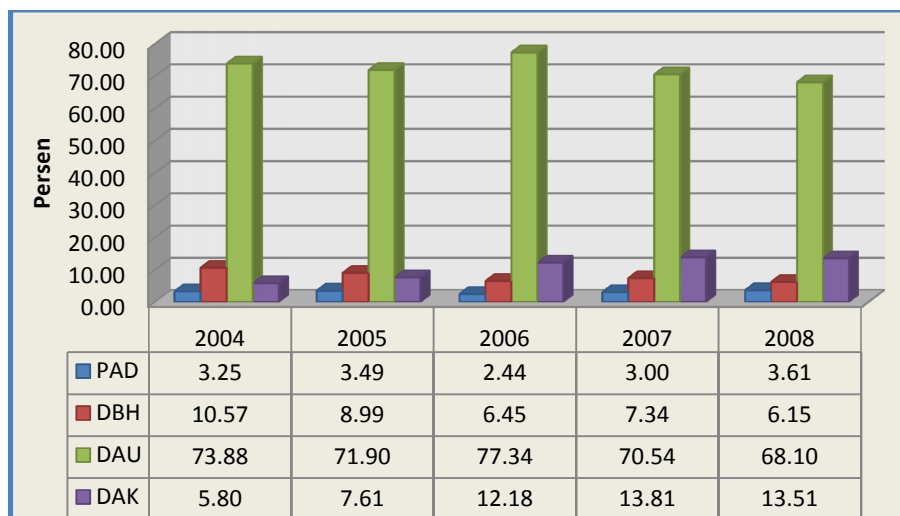
kembali turun, yaitu menjadi 0,000000401. Angka ini juga masih di bawah rata-rata rasio belanja daerah kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2008 yang mencapai 0,000000630.

#### **5.1.1.2. Komposisi Penerimaan Daerah**

Pada periode 2004-2008 struktur atau komposisi penerimaan daerah juga masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber penerimaan yang berasal dari transfer pusat, terutama dalam bentuk dana perimbangan. Tahun 2004 kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 73,88 persen pada rata-rata penerimaan daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, kemudian turun menjadi 71,90 persen di tahun 2005. Hingga tahun 2008, kontribusi DAU masih mencapai angka 68,10 persen.

Sementara itu, peran Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penerimaan daerah terlihat semakin meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, DAK telah memberikan kontribusi terbesar kedua dalam penerimaan daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu. Hingga tahun 2008, kontribusi DAK mencapai 13,51 persen atau jauh lebih tinggi dibanding tahun 2004 yang hanya sebesar 5,80 persen. Akan tetapi peningkatan kontribusi DAK ini juga diikuti dengan semakin turunnya peran Dana Bagi Hasil (DBH). Artinya selama periode 2004-2008 ada perubahan komposisi dalam sumber-sumber penerimaan daerah, di mana peran DAK semakin meningkat sementara kontribusi DBH semakin lama semakin kecil.

**Gambar 5. 2.**  
**Komposisi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu**  
**Tahun 2004-2008**



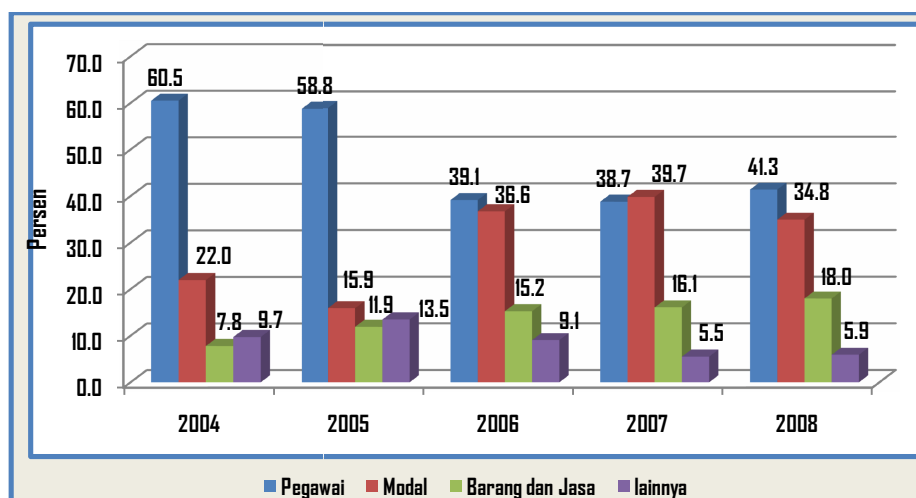
*Sumber : BPK, Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai tahun, data diolah.*

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memberikan kontribusi yang sangat minim dalam penerimaan daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu. Tahun 2004, kontribusi PAD sebesar 3,25 persen dan naik menjadi 3,49 persen di tahun 2005. Sampai tahun 2008, sumbangan PAD dalam penerimaan daerah hanya mencapai 3,61 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata kontribusi PAD kabupaten/kota se Indonesia yang mencapai angka 6,8 persen di tahun 2008 (Depkeu, 2009). Dengan kata lain, rata-rata kontribusi PAD kabupaten/kota di provinsi Bengkulu hanya separuh dari rata-rata kontribusi PAD kabupaten/kota secara nasional.

### 5.1.1.3. Alokasi Belanja Daerah

Berkaitan dengan belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, terlihat bahwa alokasi belanja daerah selama periode 2004-2008 masih menunjukkan besarnya anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai. Bahkan pada tahun 2004 dan 2005 porsi belanja pegawai rata-rata sempat mencapai besaran 60,5 persen dan 58,8 persen dari total belanja kabupaten/kota di provinsi Bengkulu. Tahun 2006 dan 2007 proporsinya turun, masing-masing menjadi 39,1 persen dan 38,7 persen. Proporsi belanja pegawai kembali meningkat menjadi 41,3 persen pada tahun 2008. Meskipun demikian angka tersebut masih berada di bawah rata-rata belanja pegawai kabupaten/kota se Indonesia tahun 2008 yang mencapai 44,2 persen (Depkeu, 2009). Secara jelas, rata-rata alokasi belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu tahun 2004 – 2008 dapat dilihat pada gambar berikut;

**Gambar 5. 3.**  
**Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu**  
**Tahun 2004-2008**



Sumber : BPK, Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai tahun, data diolah.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan alokasi belanja modal kabupaten/kota di provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dibandingkan dengan tahun-tahun awal pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada tahun 2004, proporsi belanja modal sebesar 22 persen, dan menurun di tahun berikutnya menjadi 16,9 persen. Pada tahun 2006 proporsi belanja modal meningkat lebih dari duakali lipat menjadi 36,6 persen, dan terus naik menjadi 39,9 persen di tahun 2007. Bahkan di tahun 2007 ini, alokasi belanja modal merupakan komponen belanja terbesar menggantikan dominasi belanja untuk pegawai. Tahun 2008 proporsi belanja modal kembali turun menjadi 34,8 persen, namun, proporsinya masih di atas rata-rata belanja modal kabupaten/kota se Indonesia yang sebesar 30 persen pada tahun 2008 (Depkeu, 2009). Artinya pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu mampu mengalokasikan belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang dilakukan oleh kabupaten/kota lain di Indonesia.

Sementara itu, alokasi untuk belanja barang dan jasa selama periode 2004–2008 cenderung mengalami peningkatan. Proporsi belanja barang dan jasa tahun 2008 mencapai 18 persen atau lebih besar dibanding tahun 2004 yang hanya sebesar 7 persen atau tahun 2005 yang mencapai 11 persen. Angka ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan alokasi belanja untuk barang dan jasa pada kabupaten/kota se Indonesia tahun 2008 yang mencapai 17,3 persen (Depkeu, 2009). Dengan kata lain, pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu lebih banyak mengalokasikan belanja untuk barang dan jasa dibandingkan dengan belanja barang dan jasa yang dialokasikan oleh kabupaten/kota lain di Indonesia.

## 5.1.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

### 5.1.2.1. Pengujian Model

Dalam menggunakan data panel, setidaknya ada 3 tehnik analisis yang dapat digunakan, yaitu *common effect*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk memilih model yang tepat dari ketiga tehnik analisis tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pengujian, yaitu F Test, Uji Hausman, serta Uji Langrange Multiplier (LM). Uji Langrange Multiplier (LM) perlu dilakukan dilakukan apabila hasil F test menunjukkan *Common Effect* sebagai model yang sesuai sementara Uji Hausman menunjukkan bahwa *Random Effect* sebagai model yang sesuai, sehingga perlu dibandingkan antara kedua model melalui uji LM.

#### 5.1.2.1.1. F Test

Pengujian F test digunakan untuk membandingkan antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect Model* sebagai model yang paling cocok untuk analisis data panel. Adapun kaidah keputusan dalam pengujian F test adalah sebagai berikut;

H0 ; Common Effect atau Pool Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai F test dan Chi Square pada desentralisasi fiskal sebesar 3,709 dan 30,949 dengan probabilitas sebesar 0,004 dan 0,0001 atau lebih kecil dari Alpha 0,05, sehingga kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* sebagai tehnik analisis yang lebih sesuai. Secara lengkap hasil F Test disajikan dalam tabel berikut;

**Tabel 5. 1.**  
**Hasil Pengujian Untuk Menentukan Tehnik Analisis Yang Sesuai Antara**  
**Common Effect Model dengan Fixed Effect Model Melalui F Test**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: <b>Fiscal Decentralization</b>			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.709753	(8,30)	0.0040
Cross-section Chi-square	30.949489	8	0.0001

Sumber ; Hasil pengolahan data, Eviews 6

#### 5.1.2.1.2. Hausman Test

Uji Hausman digunakan untuk memilih tehnik analisis yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* dalam penggunaan data panel. Adapun kaidah keputusan untuk melakukan uji Hausman adalah sebagai berikut;

H0 ; Random Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Hasil analisis pada tabel 5.2. menunjukkan bahwa nilai chi square adalah sebesar 27,776 dengan probabilitas 0,0001. Dengan kata lain nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari Alpha 0,05, sehingga kita dapat menolak H0 dan menyimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 5. 2.**  
**Hasil Pengujian Untuk Memilih Teknik Analisis Yang Sesuai Antara**  
**Random Effect Model dengan Fixed Effect Model Melalui Hausman Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: <b>Fiscal Decentralization</b>			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.776487	6	0.0001

\*\* Warning: estimated cross-section random effects variance is zero.

Sumber ; Hasil pengolahan data, Eviews 6

Berdasarkan hasil F test dan Hausman test dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) atau sering disebut juga sebagai *Least Square Dummy Variable* (LSDV) merupakan tehnik analisis yang paling sesuai untuk digunakan dalam analisis data panel ini. Dengan demikian uji Langarange Multiplier (LM), yaitu pengujian untuk memilih antara Common Effect dengan Random Effect Model menjadi tidak diperlukan lagi.

### 5.1.2.2. Pengujian Asumsi Klasik

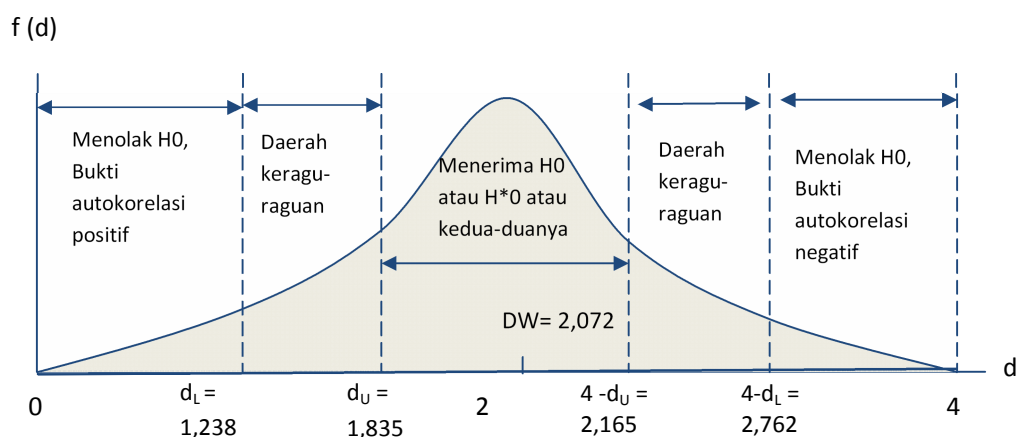
#### 5.1.2.2.1. Autokorelasi

Autokorelasi dalam konsep regresi berarti komponen error atau residual berkorelasi berdasarkan urutan waktu (pada data time series) atau urutan ruang (pada data cross section). Untuk mendapatkan hasil yang baik, seharusnya model terbebas dari persoalan autokorelasi Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin Watson (DW). Penggunaan statistik DW atau uji Durbin-Watson ini dikarenakan dalam hasil analisis regresi eviews 6, nilai

statistik DW biasanya selalu dihadirkan bersamaan dengan hasil regresi variabel lainnya, sehingga uji Durbin Watson menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,072. Berdasarkan tabel Durbin Watson dengan  $n = 45$  dan  $k = 6$ , maka diperoleh nilai  $d_L = 1,238$  dan  $d_U = 1,835$ . Dengan demikian nilai Durbin Watson yang dihasilkan terletak pada kaidah keputusan untuk menolak adanya autokorelasi, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut;

**Gambar 5. 4.**  
**Hasil Pengujian Autokorelasi melalui Durbin Watson Test**



Sumber ; Hasil pengolahan data, Eviews 6

#### 5.1.2.2.2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi di mana varian ( $\sigma^2$ ) dari faktor gangguan atau error term (*disturbance term*) adalah tidak sama untuk semua observasi atau pengamatan atas variabel bebas ( $X_i$ ). Untuk melihat apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model akan digunakan white test. Adapun kaidah keputusannya adalah sebagai berikut;

H0 = residual bersifat homoskedastisitas

H1 = residual bersifat heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis residual menggunakan software Eviews 6, diperoleh White test sebesar 19,064 dengan probabilitas 0,162. Dengan demikian nilai probabilitas white test lebih besar dari nilai Alpha 0,05, sehingga kita tidak dapat menolak H0 dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. Secara jelas hasil pengujian heteroskedastisitas tersaji dalam tabel berikut;

**Tabel 5. 3.**  
**Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Melalui White Test**

Heteroskedasticity Test: White ( <b>Fiscal Decentralization</b> )			
F-statistic	1.575219	Prob. F(14,30)	0.1445
Obs*R-squared	19.06493	Prob. Chi-Square(14)	0.1625
Scaled explained SS	8.710824	Prob. Chi-Square(14)	0.8491

Sumber ; Hasil pengolahan data, Eviews 6

#### 5.1.2.2.3. Multikolinearitas

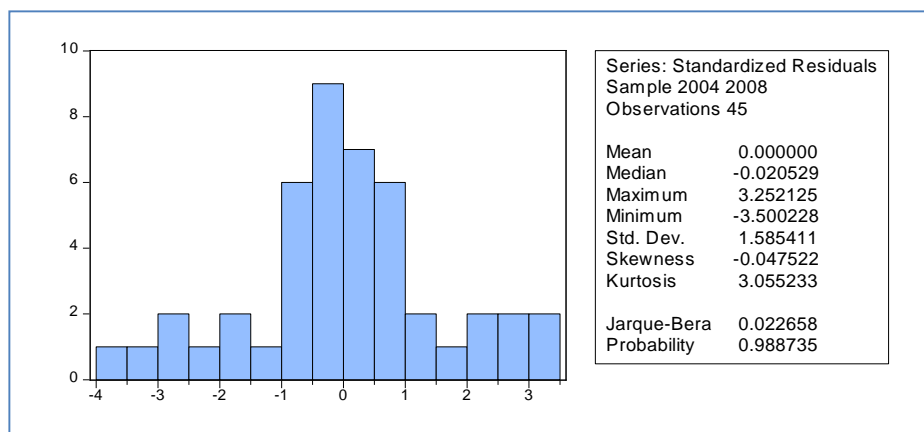
Uji multikolinearitas dilakukan dengan pendeteksian atas nilai  $R^2$  dan signifikansi dari variabel yang digunakan. *Rule of Thumb* mengatakan apabila didapatkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang tinggi sementara terdapat sebagian besar atau semua variabel yang secara parsial tidak signifikan, maka diduga terjadi multikolinearitas pada model tersebut (Gujarati, 2004). Lebih dari itu, multikolinearitas biasanya terjadi pada estimasi yang menggunakan data runtut waktu (*time series*) sehingga dengan mengkombinasikan data yang ada dengan data *cross section* mengakibatkan masalah multikolinearitas secara teknis

dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section*, sehingga secara teknis dapat dikatakan persoalan multikolinearitas relatif dapat diatasi. Hal ini diperkuat dengan hasil korelasi antar variabel bebas yang tidak ada di atas 0,80 atau berkorelasi sempurna (Lampiran VI). Khusus pada korelasi antara DF dan DF<sup>2</sup> asumsi multikolinearitas dapat dilonggarkan, karena pada dasarnya multikolinearitas hanya terjadi pada hubungan yang bersifat linear dan tidak pada hubungan nirlinear (Sumodiningrat, 1999)

#### 5.1.2.2.4. Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik menggunakan *eviews 6*, diperoleh nilai Jarque- Bera sebesar sebesar 0,0226 dengan probabilitas sebesar 0,9887. Dengan demikian nilai probabilitas Jarque- Bera besar dari alpha 0,05, sehingga kita tidak dapat menolak H0 dan menyimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 5. 5.**  
**Hasil Pengujian Normalitas Melalui Jarque – Bera Test**



Sumber ; Hasil pengolahan data, *Eviews 6*.

### 5.1.2.3. Pengujian Kriteria Statistik

#### 5.1.2.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan ketepatan atau *goodness of fit* model yang digunakan. Semakin besar nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), yang dicerminkan pada angka koefisien determinasi mendekati satu (1) maka akan semakin baik model tersebut dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Sebaliknya, semakin kecil nilai  $R^2$  atau nilainya mendekati Nol (0), maka akan semakin tidak baik model yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  sebesar 0,575. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (DF dan DF<sup>2</sup>) serta variabel-variabel kontrol yang terdiri dari; Level Awal Pertumbuhan PDRB (IL\_PDRB), Pertumbuhan Penduduk (POP), Investasi (INVS), dan *Human Capital* (HUMANCAP) telah memberikan kontribusi sebesar 57,5 persen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Sedangkan sisanya sebesar 42,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam studi ini. Dengan demikian secara umum model yang dipergunakan ini dapat dikatakan cukup baik untuk menjelaskan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

#### 5.1.2.3.2. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh simultan pengaruh variabel-variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Hasil analisa data menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 2,898 dengan probabilitas sebesar 0,007. Jika dibandingkan dengan Alpha 5 %, maka nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari Alpha yang ditetapkan ( $0,004 < 0,05$ ). Dengan demikian kita dapat menolak  $H_0$  dan mengambil kesimpulan bahwa variabel desentralisasi fiskal (DF dan  $DF^2$ ) serta variabel-variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan PDRB (IL\_PDRB), Pertumbuhan Penduduk (POP), Investasi (INVS), dan *Human Capital* (HUMANCAP) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

#### 5.1.2.3.3. Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua variabel bebas terbukti memiliki hubungan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung variabel desentralisasi fiskal (DF) sebesar 2,719 dengan probabilitas sebesar 0,010. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada Alpha 0,05. ( $0,010 < 0,05$ ), sehingga kita dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, nilai t hitung variabel

desentralisasi fiskal yang dikuadratkan ( $DF^2$ ) adalah sebesar -3,219 dengan probabilitas 0,003. Artinya nilai probabilitas lebih kecil dari Alpha 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ), sehingga kita dapat menolak  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa pada saat derajat desentralisasi tinggi, maka desentralisasi fiskal akan berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, bentuk *hump-shaped* terbukti terjadi pada hubungan atau pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu, yaitu ketika derajat desentralisasi belum terlampaui tinggi, maka peningkatan desentralisasi akan memiliki pengaruh positif, tetapi pada derajat desentralisasi yang tinggi, peningkatan desentralisasi tersebut justru akan menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 5. 4.**  
**Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)**

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.	Kesimpulan
C	3.668568	0.680055	0.5017	Tidak Signifikan
DF	3.880268	2.719714	0.0108	Signifikan
$DF^2$	-0.637729	-3.219605	0.0031	Signifikan
IL_PDRB	-6.204003	-3.854739	0.0006	Signifikan
POP	-0.087955	-1.149113	0.2596	Tidak Signifikan
INVS	0.284257	2.783520	0.0092	Signifikan
HUMANCAP	0.344936	2.961137	0.0059	Signifikan
R Squared	0.574969			
F Statistik	2.898791			
Prob. F statistik	0.007056			

Sumber ; Hasil pengolahan data, Eviews 6.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa hasil regresi pada variabel kontrol menunjukkan bahwa Level Awal Pertumbuhan (IL\_PDRB) memiliki nilai t hitung sebesar -3,854 atau probabilitas sebesar 0,0006. Jika hasil ini dibandingkan dengan alpha (0,05), maka nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari Alpha ( $0,0006 < \text{Alpha } 0,05$ ), sehingga kita dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ )

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif Level Awal Pertumbuhan PDRB (IL\_PDRB) terhadap Perumbuhan Ekonomi. Begitu juga pada variabel Investasi (INVS) dan *Human Capital* (HUMANCAP), masing-masing menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,783 dan 2,961 atau probabilitas sebesar 0,009 dan 0,005. Karena nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada Alpha (0,05), maka kita juga dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ). Dengan kata lain terbukti bahwa Investasi dan *Human Capital* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, untuk variabel pertumbuhan penduduk (POP), meski telah menunjukkan arah hubungan yang sesuai dengan hipotesis, yakni berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi nilai t hitung yang diperoleh sebesar -1,149 dengan probabilitas sebesar 0,259 adalah lebih besar jika dibandingkan dengan Alpha 0,05 ( $0,259 > 0,05$ ). Dengan demikian kita tidak dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

## **5.2. Pembahasan**

### **5.2.1. Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Bengkulu**

Penerimaan daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu selama pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini sebagai konsekuensi dari rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bahkan jika dicermati sesungguhnya kontribusi PAD kabupaten/kota di provinsi Bengkulu masih jauh di bawah rata-rata kontribusi PAD kabupaten/kota lain di Indonesia yang secara umum juga masih termasuk kecil. Kuncoro (2004) menjelaskan penyebab ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat tersebut, antara lain; (i) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah, (ii) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (iii) kendatipun pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan, dan (iv) adanya kekhawatiran akan terjadi disintegrasi dan separatisme bila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi.

Minimnya peran PAD dalam penerimaan daerah tentu saja sangat memprihatinkan. Jin dan Zou (2005) menjelaskan bahwa dalam konteks desentralisasi fiskal, seharusnya pemberian kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur pengeluaran daerah sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat

lokal diseimbangkan dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya berkaitan dengan kewenangan perpajakan. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Pemberian tanggung jawab yang semakin besar kepada daerah tentunya berdampak terhadap semakin besarnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin baik, yang kenyataannya tidak selamanya dapat dipenuhi dari dana transfer. Masyarakat akan selalu menuntut pelayanan yang lebih sesuai dengan pajak yang dibayarnya. Sementara disisi lain, basis pajak kabupaten dan kota sangat terbatas mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.

Lebih jauh Depkeu (2009) telah menengarai bahwa pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi daerah yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi. Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluarannya dan sekaligus untuk meningkatkan akuntabilitas daerah, perlu upaya penguatan *taxing power* daerah. Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan antara lain; (i)

menyelaraskan perpajakan dan retribusi daerah dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) memperluas basis pajak daerah dan memberikan keleluasaan dalam penerapan tarif; dan (iii) mempertegas dan memperkuat dasar-dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, pada sisi belanja daerah, terlihat bahwa belanja pegawai masih menjadi pengeluaran terbesar pada anggaran pemerintah daerah. Tetapi, dalam perkembangannya porsi belanja pegawai ini menunjukkan trend yang semakin menurun sementara alokasi belanja modal mengalami peningkatan yang cukup besar. Dengan demikian ada pergeseran dalam alokasi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, dimana proporsi belanja modal semakin meningkat dibandingkan belanja lainnya. Bahkan proporsi belanja modal kabupaten/kota di provinsi Bengkulu melebihi rata-rata belanja modal yang dilakukan kabupaten/kota se Indonesia pada tahun 2008. Dengan memperkuat dan memperbesar alokasi belanja modal dalam anggaran daerah, artinya ada kecenderungan pemerintah daerah telah melakukan program-program yang berhubungan dengan usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dibanding ketika anggaran pemerintah lebih terfokus pada belanja pegawai dan belanja operasi lainnya.

Proporsi yang besar dalam belanja modal kabupaten/kota di provinsi Bengkulu ini juga dapat mendukung terwujudnya kemandirian daerah dalam era desentralisasi fiskal. Abimanyu (2005) menjelaskan bahwa dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk

meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin, terutama untuk belanja pegawai. Senada dengan itu, Davoodi dan Zou (1998) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan desentralisasi fiskal dalam beberapa hal menjadi kurang menguntungkan bagi pembangunan, antara lain komposisi pengeluaran pemerintah, penetapan pendapatan yang kurang tepat oleh pemerintah daerah, keuntungan efisiensi desentralisasi fiskal yang kurang materiil di negara-negara berkembang dan ketidakcakapan aparatur daerah.

Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditegaskan Halim (2001) bahwa tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.

Pentingnya Belanja modal ini juga diakui oleh Lin dan Liu (2000) yang menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Juga sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) yang membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, atau hasil studi James and Halit

(2008) menyatakan bahwa belanja modal memiliki efek pertumbuhan positif di negara berkembang bahkan dengan pemerintah yang tidak efektif sekalipun. Dengan demikian, perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik pada anggaran pengeluaran kabupaten/kota di provinsi Bengkulu akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

#### 5.2.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Studi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu ini didasarkan pada asumsi Thiessen (2003) dan Akai (2007) yang mengidentifikasi bentuk kuadratik pada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian model regresi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu menggunakan bentuk fungsi kuadratik, yaitu  $Growth = a + {}_1DF + {}_2DF^2$ . Hubungan akan berbentuk *hump-shaped* (a *hump-shaped relation*) jika koefisien  ${}_1$  positif dan  ${}_2$  negatif. Menurut Thiiesen pendekatan ini juga digunakan oleh Calmfors dan Driffill (1988) untuk menguji apakah terdapat sebuah hubungan *hump-shaped* antara kinerja ekonomi dengan tingkat sentralisasi penawaran upah, dan mereka menemukan bukti yang mendukung hipotesis ini.

Studi terdahulu mengenai desentralisasi fiskal umumnya menggunakan dua indikator, yaitu indikator penerimaan dan indikator pengeluaran. Namun dalam studi ini, estimasi akan berfokus pada variabel desentralisasi fiskal indikator

pengeluaran karena sisi pengeluaran, yaitu belanja riil yang telah dilakukan oleh pemerintah, diyakini akan mampu menjelaskan pengaruhnya secara lebih baik dibanding sisi penerimaan. Selain itu, Malik (2007) berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memungut pajak-pajak strategis dan kemudian mendistribusikannya kepada pemerintah daerah sementara tanggung jawab pengeluaran diberikan kepada pemerintah daerah, maka sisi pengeluaran merupakan indikator desentralisasi fiskal yang lebih baik dibandingkan dengan sisi pendapatan. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, sebagian besar kewenangan untuk memungut pajak dan sumber-sumber penerimaan lainnya memang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, sementara daerah hanya akan mendapatkan penerimaannya melalui transfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian, fokus desentralisasi fiskal terhadap indikator pengeluaran akan menjadi lebih baik.

#### **5.2.2.1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (DF) terbukti positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu, sementara variabel kuadrat desentralisasi fiskal ( $DF^2$ ) memberikan hasil negatif dan signifikan. Dengan demikian hasil studi mencerminkan kesesuaian dengan dugaan awal bahwa terdapat bentuk *Hump-shaped* dalam pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Artinya desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi hanya pada saat derajat desentralisasi belum terlalu tinggi. Akan tetapi jika desentralisasi sudah terlalu tinggi, maka peningkatan desentralisasi justru akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun persamaan model yang dihasilkan dari estimasi pengaruh desentralisasi fiskal pada indikator penerimaan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu sebagai berikut;

$$\text{GROWTH} = 3,668568 + 3,880268 \text{ DF} - 0,637729 \text{ DF}^2 - 6,204003 \text{ IL\_PDRB} - 0,087955 \text{ POP} + 0,284257 \text{ INVS} + 0,344936 \text{ HUMANCAP}$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada saat desentralisasi fiskal masih rendah, maka penambahan 0,0000001 derajat desentralisasi fiskal (DF) yang diukur dari rasio total belanja daerah terhadap total belanja pemerintah pusat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi perkapita naik sebesar 3,880268 persen, namun pada saat desentralisasi terlampau tinggi, maka penambahan Desentralisasi Fiskal (DF<sup>2</sup>) justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi perkapita turun sebesar 0,637729 persen.

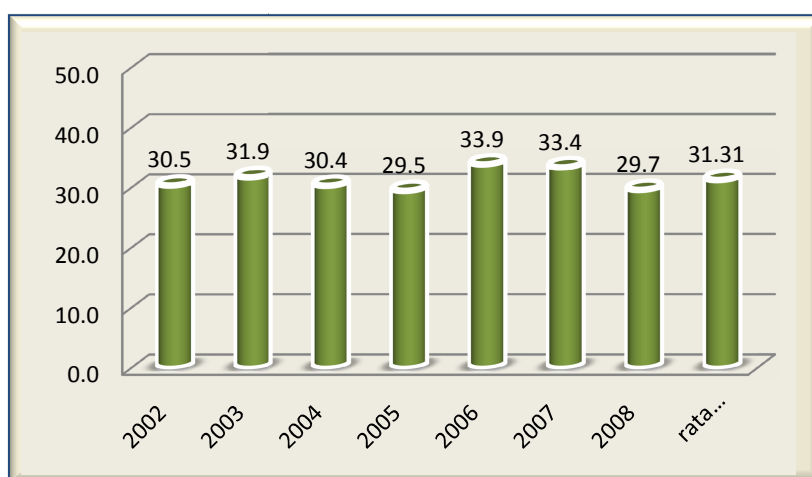
Hasil analisis yang menunjukkan bentuk *Hump-shaped* dalam pengaruh desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Akai (2007) dan Thiessen (2003). Lebih jauh, hasil studi ini dapat melengkapi hasil penelitian keduanya, karena baik Akai dan Thiessen menggunakan data *cross section*, sedangkan studi ini menggunakan data panel yang lebih bersifat dinamis. Disamping itu, hasil studi ini dapat menjembatani perbedaan pendapat yang terjadi pada penelitian sebelumnya,

khususnya berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana hasil studi Malik dkk (2006), Iimi (2005), Fadjar dan Sembiring (2007), serta Wibowo (2008) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara hasil studi Xie et al (1999), Zhang dan Zou (1998), serta Jin dan Zou (2005) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui bentuk *hump-shaped* ini dapat diketahui bahwa peningkatan desentralisasi fiskal akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika dilaksanakan pada daerah yang tingkat desentralisasinya belum terlalu tinggi, sementara pada daerah atau wilayah dengan tingkat desentralisasi terlalu tinggi, maka peningkatan desentralisasi tersebut akan mengurangi atau berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa fakta yang mendukung hasil studi ini ini dapat ditelusuri antara lain pada studi Fadjar dan Sembiring (2007) serta Wibowo (2008) pada kasus desentralisasi fiskal di Indonesia. Upaya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang utuh di Indonesia baru dilaksanakan secara efektif pada tahun 2001 sejak dikeluarkannya UU no 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dengan periode implementasi yang relatif singkat tersebut, nampaknya masih banyak urusan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat dan berimplikasi pada dominasi anggaran penerimaan dan pengeluaran oleh pemerintah pusat. Selama periode 2002-2008, nilai transfer ke daerah terhadap belanja pemerintah pusat relatif belum terlalu tinggi, rata-rata hanya mencapai 31,31 persen, padahal transfer ke daerah ini merupakan komponen terbesar dalam penerimaan daerah.

Dengan demikian ada kecenderungan derajat desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum masih belum terlalu tinggi sehingga hasil kedua studi tersebut menemukan hubungan positif antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebagaimana gambar di bawah ini;

**Gambar 5. 6.**  
**Proporsi Transfer Ke Daerah Terhadap Total Belanja Pemerintah**  
**Tahun 2002 - 2008 (%)**



*Sumber; BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, berbagai tahun, data diolah*

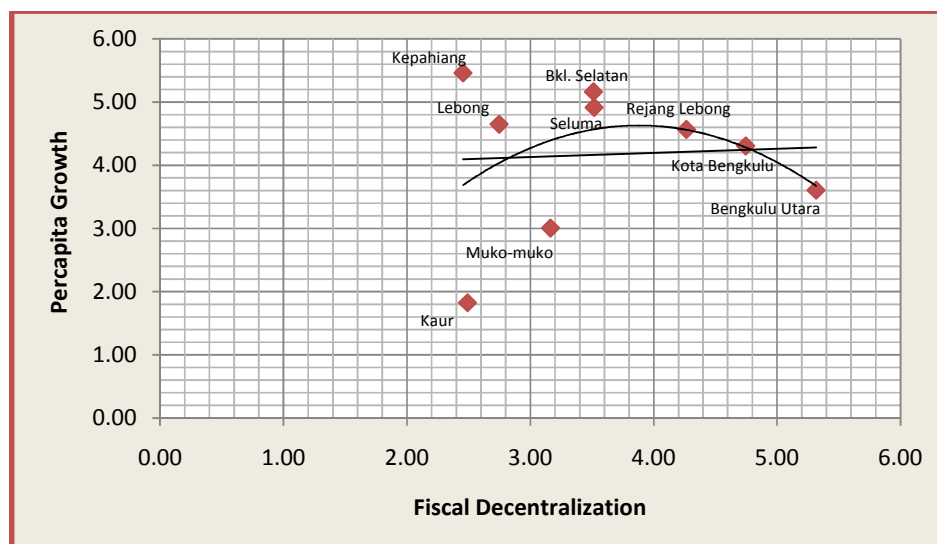
Begitu juga pada hasil studi Malik dkk (2007) tentang desentralisasi fiskal di Pakistan yang menunjukkan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya Pakistan memiliki struktur yang sangat terpusat (sentralistis), dicirikan oleh kewenangan besar yang diberikan oleh konstitusi dalam kekuasaan politik, administrasi dan sistem fiskal. Konstitusi Pakistan memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Federal untuk memungut pajak yang paling produktif, antara lain; pajak atas pendapatan non-pertanian, pajak impor, produksi atau tugas cukai dan pajak penjualan. Setelah dikumpulkan,

pajak ini kemudian dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah daerah. Pada tahun 1971 porsi pemerintah daerah masih di bawah 30 persen dan meningkat 37,5 menjadi persen 1997. Mulai tahun 2006-2007 proporsi pemerintah provinsi ditingkatkan menjadi 41,5 persen dan 42,5 persen (Malik 2007). Dari sisi pengeluaran, pada tahun 1971-1972, pengeluaran pemerintah provinsi hanya memberikan kontribusi sebesar 29 persen dari terhadap pengeluaran pemerintah pusat dan menjadi 43,62 persen pada tahun 2005-2006 (Malik, 2007). Kondisi ini menunjukkan bahwa trend peningkatan proporsi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau proses desentralisasi fiskal di Pakistan berjalan mulai dari tingkat yang cukup rendah, sehingga peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan.

Pada kasus berbeda, yang menyatakan adanya pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina seperti yang dikemukakan Zhang dan Zou (1998) serta Jin dan Zou (2005) dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 1970-an Cina telah mempromosikan reformasi fiskal dengan memberikan desentralisasi fiskal pada sisi pengeluaran dan tetap menjamin peran pemerintah pusat di sisi pendapatan. Berkaitan dengan desentralisasi fiskal di china ini, Zhang dan Zou (1998) menyadari bahwa dalam paruh pertama tahun 1990-an, desentralisasi fiskal di Cina dilaksanakan terlalu cepat dan terlalu ekstensif, sehingga desentralisasi fiskal yang lebih tinggi justru menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah di Cina menjadi lebih rendah.

Lebih jauh, bentuk *hump-shaped* (a *hump-shaped relation*) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu dapat dilihat secara jelas pada gambar di bawah ini;

**Gambar 5. 7.**  
**Bentuk *Hump-Shaped* Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu**



*Keterangan; Berdasarkan rata-rata Percapita Growth dan Fiscal Decentralization tahun 2004-2008 pada masing-masing kabupaten/kota.*

Dari gambar di atas terlihat bahwa daerah yang memiliki desentralisasi fiskal rendah seperti kabupaten Lebong dan Kaur memiliki pertumbuhan ekonomi perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan desentralisasi fiskal tinggi seperti Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu. Sementara itu, kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perkapita.

Meskipun terdapat fakta empiris mengenai bentuk *hump-shaped* (a *hump-shaped relation*) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu, bukan berarti pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat

mengabaikan kaidah-kaidah dasar yang melatarbelakangi gagasan tentang desentralisasi fiskal tersebut. Karena jika dalam prakteknya pelaksanaan desentralisasi fiskal menyimpang dari kaidah ini, maka peningkatan desentralisasi fiskal dapat merugikan bagi pertumbuhan ekonomi, bahkan pada saat derajat desentralisasi belum terlalu tinggi (Prud'homme 1995; Tanzi, 1996).

Oates dan Tiebot mengemukakan beberapa kaidah dasar agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat memacu pertumbuhan ekonomi, antara lain (Jin dan Zou, 2005); *Pertama*, Pemerintah daerah cenderung akan lebih efisien dalam menyediakan dan mendistribusikan barang-barang publik yang memiliki eksternalitas tidak terlalu luas, sementara untuk barang publik yang mencakup kepentingan masyarakat sangat luas dan meliputi lintas daerah, penyediaannya lebih baik dilakukan oleh pemerintah pusat, karena apabila didesentralisasikan justru akan menimbulkan inefisiensi. Di samping itu perlu diperhatikan juga skala ekonomis dalam penyediaan barang publik tersebut. Artinya perlu pengaturan yang baik mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

*Kedua*, Pemerintah daerah harus lebih responsif dalam membuat keputusan pengeluaran daerah berkaitan dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal untuk mendorong terjadinya efisiensi alokasi atau efisiensi konsumsi (*allocative or consumer efficiency*). Artinya jika pemerintah daerah tidak responsif dan mengabaikan preferensi lokal, maka manfaat optimal desentralisasi fiskal dalam memacu pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi. Mendukung pendapat ini, World Bank menjelaskan bahwa hubungan positif antara

desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi akan berjalan jika terdapat efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah (Khusaini, 2006).

*Ketiga*, perlu pengaturan fiskal yang berimbang agar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerah. Keseimbangan fiskal antara sumber-sumber penerimaan dengan kebutuhan belanja daerah akan dapat meningkatkan akuntabilitas. Hasil studi Ghaus-Pasha (2004) menyimpulkan bahwa derajat akuntabilitas, daya tanggap dan partisipasi, serta efektifitas desentralisasi mampu membuat perbedaan besar dalam penyediaan pelayanan lokal yang lebih efisien, berkesetaraan, berkelanjutan, dan *cost-effective*.

Selain itu, Prud'homme (1995) juga menengarai beberapa persoalan yang menjadi penyebab kegagalan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain; (i) pemerintah daerah tidak dapat memenuhi preferensi masyarakat lokal, baik karena tidak adanya keinginan politik, maupun disebabkan oleh aparatur yang kurang termotivasi dan atau memenuhi syarat untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, (ii) meningkatnya korupsi di tingkat lokal karena umumnya politisi dan birokrat lokal lebih rentan karena mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Karena itu jika pemerintah daerah mampu menghilangkan ataupun mengurangi korupsi di tingkat lokal, maka desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi alokasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, (iii) adanya sistem politik yang tidak demokratis; sehingga premis dasar bahwa pemerintah daerah memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyediakan barang publik lokal secara lebih efisien

mungkin tidak berlaku (Tanzi, 1996). Dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis justru terdapat pandangan yang menganggap bahwa desentralisasi fiskal hanya sebagai alat yang digunakan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengeksploitasi sumber daya lokal dan nasional. Apabila pemerintah daerah dapat mengeliminir berbagai faktor penghambat tersebut, maka akan semakin menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

### **5.2.2.2. Pengaruh Variabel-Variabel Kontrol**

#### **5.2.2.2.1. Pengaruh Level Awal Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Level Awal Pertumbuhan (IL\_PDRB) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Secara spesifik didapatkan bahwa peningkatan satu juta rupiah dalam pendapatan perkapita tahun sebelumnya (IL\_PDRB), akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi perkapita tahun berikutnya turun sebesar 6,204003persen. Hasil ini sesuai dengan studi Renelt (1992), Thiessen (2003), serta Woller dan Phillip (1998) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi level awal pertumbuhan ekonomi (*initial per capita regional GDP*) maka akan semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam tahun berikutnya. Sebagaimana juga ditenggarai oleh Barry dan Jules (2008) yang menjelaskan bahwa Level awal pertumbuhan dapat digunakan untuk melihat tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konvergensi ini mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan *initial per capita regional GDP*.

#### **5.2.2.2.2. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk**

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa variabel Pertumbuhan Penduduk (POP) memiliki arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu, tetapi tidak secara signifikan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa satu persen peningkatan laju pertumbuhan penduduk (POP), maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi perkapita hanya turun sebesar 0,087955 persen. Tidak terbuktinya hubungan signifikan antara pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu antara lain disebabkan oleh jumlah penduduk yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya. Sampai tahun 2008, total penduduk provinsi Bengkulu hanya berkisar 1,64 juta jiwa dan luas wilayah sebesar 19.788 ha atau memiliki kepadatan sebesar 83 km<sup>2</sup> (83 jiwa per km<sup>2</sup>). Dengan demikian tambahan penduduk tersebut belum terlalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namunpun demikian, hasil estimasi yang menunjukkan arah hubungan negatif ini juga ditemukan pada hasil penelitian Woller dan Phillip (1998), Baskaran dan Feld (2009), serta Iimi (2005). Hasil ini mendukung pula pendapat Mankiw (2003) yang menjelaskan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Selain itu dapat dijelaskan pula bahwa dengan semakin tinggi jumlah penduduk, maka total output yang dihasilkan akan terbagi kepada lebih banyak penduduk, sehingga menyebabkan semakin sedikitnya output yang akan diterima oleh masing-masing penduduk.

#### **5.2.2.2.3. Pengaruh Investasi**

Hasil analisis variabel Investasi juga menunjukkan arah hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya penambahan rasio investasi per PDRB akan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa satu persen peningkatan rasio investasi terhadap PDRB (INVS) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi perkapita sebesar 0,284257 persen. Hasil yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan variabel investasi ini juga tidak berbeda dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998), Jin dan Zou (2005) serta Baskaran dan Feld (2009).

#### **5.2.2.2.4. Pengaruh Human Capital**

Hasil estimasi terhadap variabel *Human Capital* menunjukkan bahwa *Human Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Dari hasil estimasi juga diketahui bahwa peningkatan satu persen *Human Capital* akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,344936 persen. Hasil ini konsisten dengan apa yang telah ditemukan oleh Thiessen (2003), Iimi (2005), Wibowo (2008), serta Woller dan Phillips (1998). Dengan demikian semakin tinggi *Human Capital*, yaitu rasio penyelesaian pendidikan menengah (SMP) terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu meningkat cukup besar. Meskipun demikian secara umum, rata-rata derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di provinsi Bengkulu masih menunjukkan tingkat yang rendah, baik pada dari penerimaan maupun pengeluaran. Ini tercermin pada rata-rata rasio total pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu yang lebih rendah dari rata-rata rasio pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota se Indonesia.
2. Komposisi pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat, terutama dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara di sisi lain, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat terbatas. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah, karena Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara

efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi.

3. Alokasi belanja modal yang kabupaten/kota di provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan alokasi belanja lainnya, dan secara umum alokasi belanja modal kabupaten/kota di provinsi Bengkulu juga lebih besar dari rata-rata belanja modal kabupaten/kota lain di Indonesia. Porsi belanja modal yang besar seperti ini sesungguhnya lebih baik dibandingkan jika anggaran daerah lebih terfokus pada belanja pegawai ataupun belanja barang dan jasa. Karena semakin besar alokasi belanja modal, maka akan semakin banyak anggaran yang dipergunakan untuk penyediaan barang-barang publik untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Hasil studi variabel desentralisasi fiskal (DF) terbukti positif dan signifikan sementara variabel kuadrat desentralisasi fiskal ( $DF^2$ ) terbukti negatif dan signifikan. Dengan demikian terdapat bentuk *hump-shaped* (*a hump shaped relation*) dalam pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Artinya peningkatan desentralisasi fiskal ini akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada saat derajat derajat (*degree*) desentralisasi fiskal belum terlalu tinggi, sementara pada saat derajat desentralisasi terlampau tinggi, desentralisasi fiskal justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil studi ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Akai (2007) dan Thiessen (2003).

5. Selain desentralisasi fiskal, beberapa variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam model dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu antara lain; Level Awal Pertumbuhan PDRB (IL\_PDRB) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan PDRB di periode-periode awal, maka akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun berikutnya. Sedangkan variabel Pertumbuhan Penduduk (POP) meski berpengaruh negatif, tetapi belum signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Sementara dua variabel kontrol lainnya, yaitu Investasi (INVS) dan Human Capital (HUMANCAP) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Dengan demikian semakin tinggi rasio Investasi terhadap PDRB dan *human capital* akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi Bengkulu.

## 6.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan penerimaan yang berasal dari transfer pusat. Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk penguatan *local taxing power* melalui revisi UU pajak dan retribusi daerah harus mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal.

2. Pemerintah daerah tetap perlu lebih memperbesar porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Dengan perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik pada anggaran pengeluaran kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, maka akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.
3. Daerah dengan derajat desentralisasi rendah seperti Kabupaten Kaur dan Lebong perlu meningkatkan derajat desentralisasi fiskal karena peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara daerah dengan derajat desentralisasi tinggi seperti Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara sebaiknya tidak melakukan kebijakan yang berorientasi pada usaha peningkatan derajat desentralisasi fiskal, karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah dengan derajat desentralisasi fiskal tinggi sebaiknya justru lebih berfokus untuk melakukan kebijakan efisiensi dan efektifitas pada anggaran pengeluaran pemerintah karena akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Berkaitan dengan faktor selain desentralisasi fiskal yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi (rasio investasi terhadap PDRB) dan mendorong peningkatan *Human Capital*, karena keduanya terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Studi ini masih terbatas pada daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu. Untuk itu diperlukan studi yang lebih luas mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berbasis data Provinsi atau bahkan data kabupaten/kota se Indonesia, sehingga akan dapat diidentifikasi daerah-daerah yang perlu didorong untuk meningkatkan derajat desentralisasi karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat diketahui daerah-daerah dengan tingkat desentralisasi tinggi yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan demikian pada daerah dengan derajat desentralisasi fiskal tinggi ini dapat disarankan agar lebih berorientasi pada efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. **Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih**, Bapekki Depkeu.
- Adi, Priyo Hari, 2006. **Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)**. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Akai, Nobuo, Yukihiro Nishimura, Masayo Sakata, 2007. Complementarity, Fiscal Decentralization and Economic Growth, **Economics of Governance. Heidelberg**: Sep 2007. Vol. 8, Iss. 4; p. 339
- Bahl, Roy W. dan Johannes Linn, 1992, **Urban Public Finance in Developing Countries**, New York Oxford University Press.
- Bappenas, 2007. **Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Tahun 2007**, Jakarta.
- Barry W. Poulson and Jules Gordon Kaplan, State Income Taxes and Economic Growth, **Cato Journal**, Vol. 28, No. 1 (Winter 2008).
- Barro RJ, 1990, Government Spending in a Simple Model of endogenous growth. **J Polit Econ** 98; S103-S125.
- Baskaran, Thushyanthan and Feld, P Lars, 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship?, **Cesifo Working Paper** no. 2721 Category 1: Public Finance July 2009
- Becker, G.S., Glaeser, E. L., dan Murphy, K. M., 1999. Population and Economic Growth, **The American Economic Review**, LXXXIX (2): 145-49.
- Brennan, G, and J. Buchanan (1980), **The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution**, Cambridge, U.K.
- Breuss, Fritz dan Eller, Markus, 2004. Fiscal Decentralisation and Economic Growth: Is There Really A Link? **CESifo DICE Report, Journal For Institutional Comparisons**, Volume 2 No.1, Spring 2004.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**, Simposium Nasional Akuntansi X. Unhass Makasar.

- Depkeu, 2009. **Nota Keuangan dan RAPBN 2010**.
- Fadjar A. D dan Britany Alasen Sembirin, 2007. **Efektifitas faktor input dan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia setelah desentralisasi fiskal**, Wibiz Economic Research Centre.
- Gujarati, N Damodar , 2004: **Basic Econometrics, Fourth Edition**, The McGraw–Hill Companies.
- Ghaus-Pasha A. 2004. **Role Of Civil Society Organizations In Governance**. 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance 24 - 27 May 2005, Seoul, Republic of Korea
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. **Kompak**. STIE YO. Yogyakarta.
- Hidayat, Syarif, 2005. **Too Much Too Soon ; Local States Elite’s Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy**, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hirawan, Susiyati Bambang, 2007. **Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia**, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 24 Pebruari 2007
- Iimi, Atsushi, 2005. Decentralization and economic growth revisited: an empirical note, **Journal of Urban economics** 57.
- James I. Butkiewicz and Halit Yanikkaya, 2008. **Institutions and the Impact of Government Spending on Growth**, Working Paper No. 2008-23, Department of Economics Alfred Lerner College of Business & Economics University of Delaware
- Jhingan, ML,. 2004. **Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jin, Jing & Zou, Heng-fu, 2005. Fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China, **Journal of Asian Economics**, Elsevier, vol. 16(6), pages 1047-1064, December.
- Khusaini, Mohammad, 2006. **Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah**, Malang, BPFE Unibraw.

- Kuncoro, Mudrajat. 2009. **Ekonomika Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global**, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Levine, R. dan Renelt, D., 1992. 'A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions', **American Economic Review**, LXXXII (4):942-63.
- Lin, Justin Yifu dan Liu, Zhiqiang. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, **Economic Development and Cultural Change**, Vol 49, Chicago.
- Litvack, Jennie, 1999. **Decentralization**, Washington, DC, World Bank.
- Mahi, Raksaka, 2002. **Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah**, Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, Jakarta, 25 Agustus 2002.
- Malik, Shahnawaz, dkk, 2006. Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Pakistan, **The Pakistan Development Review**, 45: 4 part ii (Winter 2006).
- Mankiw, N. Gregory, 2003. **Teori Makro Ekonomi**. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1999. **Ekonomi Publik**, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 'Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi:2005-2008" dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, **Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi**, Penerbit Kompas, Jakarta, 2009.
- Mawhood P. (ed), 1987. **Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa**. Chicester: Jhon Wiley & Sons.
- Oates, W. E, 1977. An Economist's Perspective on Fiscal Federalism, in: W. E. Oates (ed.), **The Political Economy of Fiscal Federalism**, Lexington, Toronto, 1977.
- Prud'homme, Remy, 1995. On The Danger of Decentralization, Washington DC, The World Bank, **Policy Research Working Paper**, 1252.
- Prud'homme, Remy, 2003. Fiscal Decentralization in Africa; A Framework for Considering Reform, **Wiley InterScience Journal**, DOI:10.1002/pad.256.
- Rahmawati, Farida. "Desentralisasi Fiskal, Konsep, Hambatan, dan Prospek" dalam Yustika, Ahmad Erani, 2008, **Desentralisasi Ekonomi di Indonesia (kajian Teoritis dan Realitis empiris)**, Malang, Banyumedia.

- Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**
- Riduwan, 2004. *Statistika Untuk Lembaga & Instansi Pemerintah/Swasta.* Bandung: Alfabeta.
- Rustiadi, dkk, 2007. **Perencanaan dan Pengembangan Wilayah,** Institute Pertanian Bogor.
- Siddik, Machfud, 2009. “Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004” Dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, **Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi,** Jakarta, Penerbit Kompas.
- Sturm, J. E., 1998. **Public Capital Expenditure in OECD Countries: the causes and impact of the decline in public capital spending,** Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham.
- Sumodiningrat, G, 1999. **Ekonometrika; Pengantar,** Yogyakarta, BPFE.
- Suryana, 2000. **Ekonomi Pembangunan; Problematika dan Pendekatan,** Salemba Empat, Jakarta.
- Tanzi, V., 1995. Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects,” in: Bruno, Michael, and Boris Pleskovic (eds.), **Annual World Bank Conference on Development Economics 1995,** World Bank, Washington, D.C.
- Ter-Minassian, Teresa, 1997, **Fiscal Federalism in Theory and Practice,** Washington, International Monetary Fund.
- Thiessen, Ulrich, 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries, **Fiscal Studies** Vol. 24 No. 3.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Uppal dan Suparmoko, 1986. “Inter Government Finance in Indonesia.” **Ekonomi Keuangan Indonesia,** Vol.XXXIV, Jakarta.

- Vazquez, M Jorge dan McNab M Robert, 2001. Fiscal Decentralization & Economic Growth, **Working Paper #01-1, Andrew Young School of Policy Studies**, Georgia State University.
- Wibowo, Puji, 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, **Jurnal Keuangan Public**, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008.
- Widarjono, A, 2007. **Ekonometrika; Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis (2<sup>nd</sup> edition)**, Yogyakarta, Ekonisia.
- World Bank, 2007. **Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru**.
- Woller, M Gary dan Phillips Kerk, 1998. Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An Empirical Investagion, **The Journal of Developmnet Studies**; April 1998;34,4.
- Xie, D., Zou, H., dan Davoodi, H., 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States, **Journal of Urban Economics** XLV:228-39.
- Zhang Tao dan Zou Heng fu. 1998. Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China, **Journal of Public Expenditure** 67, 221 240.

**BIODATA**

## BIODATA



### **Data Pribadi**

Nama : **Aan Zulyanto**  
NIP : 132312266  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 Oktober 1977  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Alamat : Jl. Raflesia I No. 32 RT.03 Rw. 01 Kelurahan Nusa  
Indah Bengkulu 38224  
No. Telp/HP : 0736-21842 / 081368226848  
E-mail : aanzulyanto@yahoo.com

### **Pendidikan Formal**

- ⇒ 2008 – 2010, Magister IESP Universitas Diponegoro Semarang
- ⇒ 1995-2000, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang
- ⇒ 1992-1995, SMU Negeri 3 Palembang
- ⇒ 1989-1992, SMP Negeri 9 Palembang
- ⇒ 1983-1989, SD Negeri 507 Palembang

### **Pendidikan Non Formal**

- ⇒ Tahun 1998 – 2000, Kursus Bahasa Inggris di Oxford English Course Palembang
- ⇒ Tahun 2000, Kursus Komputer di Multikom Palembang
- ⇒ Tahun 2001, Kursus Bahasa Inggris di Global English Course Palembang

### **Riwayat Pekerjaan**

- ⇒ Tahun 2005 - Sekarang, Dosen PNSD Kopertis Wilayah II Dpk Pada Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
- ⇒ Tahun 2001 – 2004, Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Abdi Nusa Palembang.

### **Pengalaman Organisasi**

- ⇒ Tahun 1997 – 2001, Wakil Ketua Ikatan Pemuda Pemudi (IPP) RT 03
- ⇒ Tahun 2001 – 2003, Anggota Pusat Informasi & Edukasi (PIE) HIV/AIDS Abdi Nusa Palembang.
- ⇒ Tahun 2004, Program Manager, Program Penanggulangan HIV/AIDS melalui Pendekatan Community Development di Kota Lubuk Linggau.

### **Pelatihan-pelatihan**

- ⇒ 27 -10 November 2006, Pelatihan Peningkatan Kualitas Pembelajaran bagi Dosen Kopertis Wilayah II, diselenggarakan oleh DIKTI di Hotel Bumi Endah Bengkulu
- ⇒ 10 – 29 Juli 2006, English Language Training (Bridging Program) Oleh Lembaga Bahasa UNSRI bekerjasama dengan PKSDMPT DIKTI.
- ⇒ 24 – 27 November 2005, Pelatihan Penulisan Metodologi Penelitian Non Research oleh Kopertis Wilayah II Palembang.
- ⇒ 7 – 23 November 2005, Pelatihan Bahasa Inggris Intensive bagi Dosen PNSD selama 106 Jam yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah II Palembang.
- ⇒ Tahun 2003, Pelatihan Memimpin LSM/OM Menuju Sukses yang diselenggarakan oleh ASA/FHI/USAID dan Bussines Dinamyc Centre.

### **Publikasi**

- ⇒ Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Palembang
- ⇒ Kebijakan Iklim Investasi : Bagaimana Pemerintah Daerah Harus Bersikap?
- ⇒ Implementasi Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Biaya Tinggi.
- ⇒ Analisa Kebijakan Fiskal Daerah terhadap perkembangan Investasi di di Kota Bengkulu.

### **Pengalaman Penelitian (sebagai Peneliti dan Enumerator)**

- ⇒ Studi Identifikasi Profil UMKM di Kota Bengkulu Tahun 2008
- ⇒ Analisa Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perkembangan Investasi di Kota Bengkulu, tahun 2007.
- ⇒ Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu, tahun 2007. Kerjasama FE UNIB, FE UNHAZ dan Dispenda Kota Bengkulu
- ⇒ Survey Dampak Sosial Ekonomi Program ICDP Taman Nasional Kerinci Sebelat, tahun 2003. kerjasama UNAND dengan Program ICDP.
- ⇒ Studi Pembiayaan Kredit Perbankan, tahun 2002. kerjasam P3EM FE UNSRI dengan Bank Indonesia Palembang.
- ⇒ Profil Produk Unggulan dan Kawasan Andalan Kabupaten Musi Rawas, tahun 2001. Kerjasama PPSDM UMP dengan Bappeda Kab. Musi Rawas.
- ⇒ Pengembangan Kawasan Tertinggal Sumatera Selatan, tahun 2000. Kerjasama P3EM FE UNSRI dengan Bappeda Provinsi Sumsel.
- ⇒ Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Palembang, tahun 2000.

Semarang, April 2010



**Aan Zulyanto**

# LAMPIRAN

LAMPIRAN V :

**Hasil Regresi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu**

Dependent Variable: GROWTH?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 02/23/10 Time: 08:23				
Sample: 2004 2008				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 9				
Total pool (balanced) observations: 45				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.668568	5.394513	0.680055	0.5017
DF?	3.880268	1.426719	2.719714	0.0108
DF <sup>2</sup> ?	-0.637729	0.198077	-3.219605	0.0031
IL?	-6.204003	1.609448	-3.854739	0.0006
POP?	-0.087955	0.076541	-1.149113	0.2596
INVS?	0.284257	0.102121	2.783520	0.0092
HUMANCAP?	0.344936	0.116488	2.961137	0.0059
Fixed Effects (Cross)				
_BKL--C	1.223027			
_BS--C	-3.759057			
_BU--C	-4.094556			
_RL--C	14.86659			
_MM--C	-1.291996			
_SLM--C	-11.98626			
_KR--C	-13.63744			
_LB--C	7.833445			
_KPH--C	10.84625			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.574969	Mean dependent var	4.165260	
Adjusted R-squared	0.376621	S.D. dependent var	2.432345	
S.E. of regression	1.920443	Akaike info criterion	4.404190	
Sum squared resid	110.6430	Schwarz criterion	5.006411	
Log likelihood	-84.09427	Hannan-Quinn criter.	4.628692	
F-statistic	2.898791	Durbin-Watson stat	2.072824	
Prob(F-statistic)	0.007056			

Keterangan ; Eviews 6 telah menyediakan fasilitas untuk memilih tehnik analisa LSDV (Fixed Effect) maupun General Least Square (Random Effect), sehingga input variabel dummy dalam model LSDV ini tidak perlu dilakukan secara manual. Koefisien dummy pada fixed effect (cross) menunjukkan perbedaan intersep masing-masing kabupaten/kota.

LAMPIRAN VI ; KORELASI ANTAR VARIABEL BEBAS

		Correlations					
		exp	exp2	il	invs	pop	humancap
exp	Pearson Correlation	1	.781(**)	.226	.398(**)	-.193	.411(**)
	Sig. (2-tailed)		.002	.136	.007	.204	.005
	N	45	45	45	45	45	45
exp2	Pearson Correlation	.781(**)	1	.217	.402(**)	-.219	.385(**)
	Sig. (2-tailed)	.002		.152	.006	.149	.009
	N	45	45	45	45	45	45
il	Pearson Correlation	.226	.217	1	.171	.050	.485(**)
	Sig. (2-tailed)	.136	.152		.261	.744	.001
	N	45	45	45	45	45	45
invs	Pearson Correlation	.398(**)	.402(**)	.171	1	.147	.695(**)
	Sig. (2-tailed)	.007	.006	.261		.335	.000
	N	45	45	45	45	45	45
pop	Pearson Correlation	-.193	-.219	.050	.147	1	.073
	Sig. (2-tailed)	.204	.149	.744	.335		.632
	N	45	45	45	45	45	45
humancap	Pearson Correlation	.411(**)	.385(**)	.485(**)	.695(**)	.073	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.009	.001	.000	.632	
	N	45	45	45	45	45	45

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).